



**PARTISIPASI POLITIK NAHDLATUL ULAMACABANG JEMBERPADA
MASA REFORMASI TAHUN 1998-2015**

SKRIPSI

Oleh

Rusdi

NIM 120210302019

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PARTISIPASI POLITIK NAHDLATUL ULAMA CABANG JEMBER PADA
MASA REFORMASI TAHUN 1998-2015**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
dan mencapai gelar Sarjana Kependidikan

Oleh

Rusdi

NIM 120210302019

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

UNIVERSITAS JEMBER

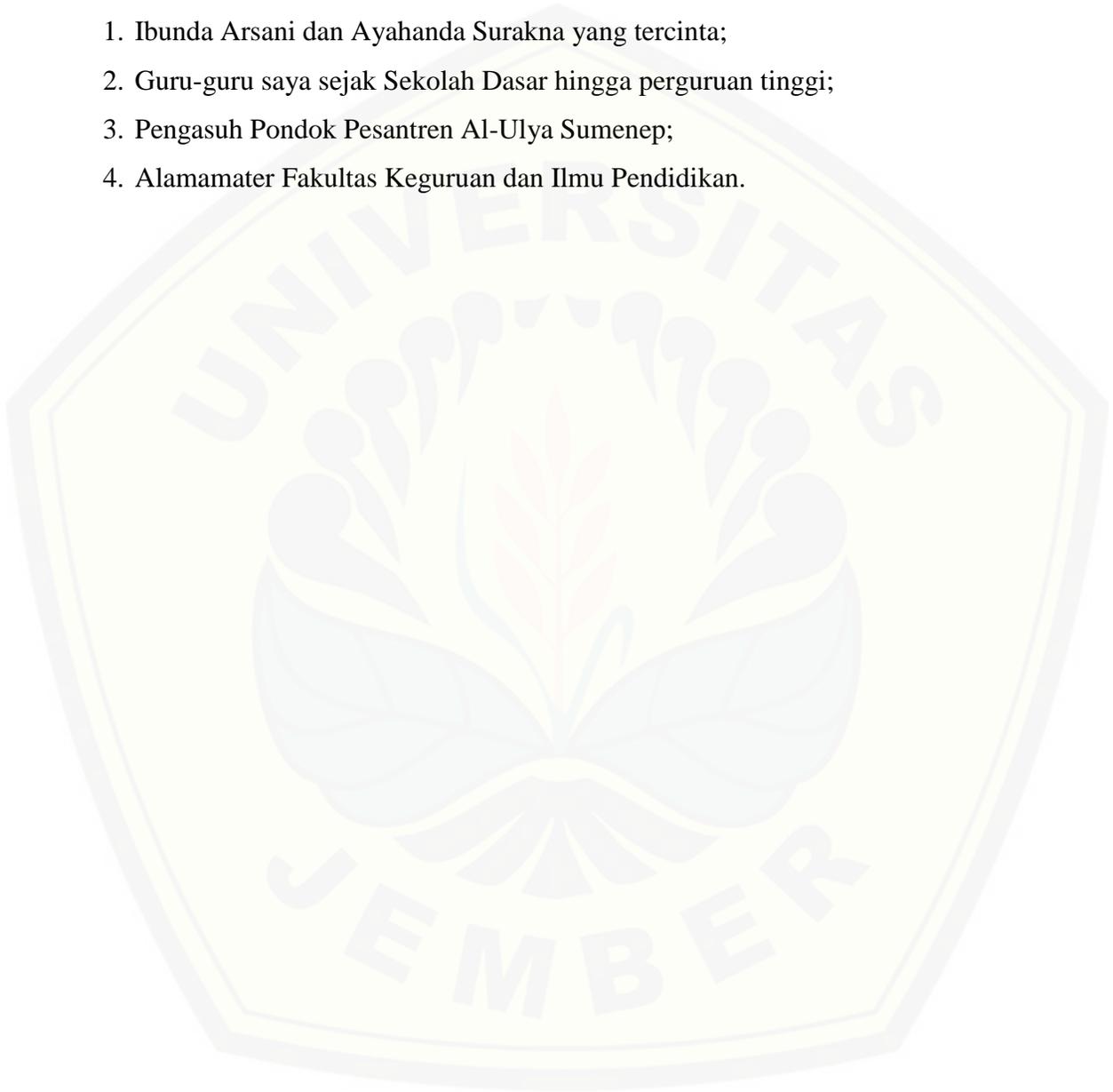
2017



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ibunda Arsani dan Ayahanda Surakna yang tercinta;
2. Guru-guru saya sejak Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi;
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ulya Sumenep;
4. Alamamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.



MOTTO

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. (terjemahan surat *An-Nahl* ayat 91)^{*)}



^{*)} Kementerian Agama RI. 2011. *Al Quran Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung : C.V Insan Kamil.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rusdi

NIM : 120210302019

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember Pada Masa Reformasi Tahun 1998-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2017

Yang menyatakan,

Rusdi

NIM 120210302019

SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK NAHDLATUL ULAMA CABANG JEMBER PADA
MASA REFORMASI TAHUN 1998-2015**

Oleh

Rusdi

NIM 120210302019

Pembimbing

Dosen Pembimbing I: Drs. Kayan Swastika, M.Si.

Dosen Pembimbing II: Drs. Sugiyanto, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada Masa Reformasi Tahun 1998-2015” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin 12 Juni 2017

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M.Si.
NIP 19670210 200212 1 002

Drs.Sugiyanto, M.Hum.
NIP195702201985031003

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Nurul Umamah, M. Pd.
NIP196902041993032008

Dr. Mohammad Na'im, M.Pd.
NIP196603282000121001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP 196808021993031004

RINGKASAN

Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada Masa Reformasi Tahun 1998-2015; Rusdi, 120210302019; 2017:115+xiiihalaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan yang didirikan pada 13 Januari 1926 sebagai wadah bagi masyarakat muslim Indonesia untuk mempertahankan keberadaan ideologi *ahlussunnah wal jama'ah*. Meskipun NU didirikan sebagai organisasi sosial keagamaan, dalam perkembangan sosial politik sejak pertama didirikan mengalami perkembangan organisasi sebagai *jam'iyah* dan sebagai partai politik. Pada muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU menegaskan gerakannya untuk tidak terjun dalam politik praktis dan lebih mengutamakan melakukan gerakan sosial keagamaan yaitu NU kembali ke *khittah* 1926. Namun *khittah* NU memiliki multi tafsir di kalangan NU sendiri, sehingga karena tuntutan sosial politik pada masa reformasi tahun 1998 NU kembali mengurus politik praktis dengan membentuk Partai Kebangkitan Bangsa. Uniknya, mulai dari tingkat pusat hingga anak cabang, PKB mengambil pengurus NU dari tingkat pusat hingga Ranting sebagai pengurus PKB, termasuk PKB di Kabupaten Jember.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi, bagaimana bentuk partisipasi politik NU Cabang pada masa reformasi tahun 1998-2015, serta bagaimana dampak sosial politik partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015.

Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi NU Cabang Jember berpartisipasi politik pada masa reformasi, menganalisis bentuk partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi 1998-2015, serta menganalisis dampak sosial politik partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa

reformasi 1998-2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dilakukan dengan empat langkah, yakni: pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Peneliti melakukan proses penulisan yang utuh dan masuk akal atas interpretasi dan eksplanasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Penelitian ini pendekatan sosiologi politik dengan teori pilihan rasional Coleman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 telah kembali terjun ke dunia politik praktis. Pengalaman politik NU Cabang Jember pada masa lalu menjadi daya dorong tersendiri untuk kembali mengurus politik. Selain itu, adanya kultur pesantren yang melekat pada masyarakat Jember semakin membuat NU menemukan relevansinya dalam mengurus politik. Guna mengaplikasikan keinginan untuk berpolitik, NU Cabang Jember juga membentuk DPC PKB Jember. Melalui DPC PKB, NU menyebarkan sejumlah kader NU dalam mengisi jabatan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, sehingga kyai NU Cabang Jember dengan memanfaatkan ketokohnya, ikut serta mengkampanyekan kader NU yang menjadi calon legislatif maupun eksekutif. Politik kyai NU Cabang Jember selalu mewarnai perkembangan politik Jember setiap pelaksanaan Pilkada. Namun keterlibatan NU Cabang Jember dalam politik praktis, memunculkan konflik kepentingan di internal NU sendiri, dan sering terjadi perebutan pengaruh menjelang pelaksanaan Pilkada Jember.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat diberikan peneliti terhadap NU Cabang Jember diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan politik dan organisasi NU sebagai organisasi sosial keagamaan, tidak terlalu masuk dalam politik praktis, sebab hanya akan menggerus nilai-nilai kewibawaan NU yang selama ini masih melekat.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada Masa Reformasi Tahun 1998-2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., P.Hd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sukidin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pengetahuan Ilmu Sosial;
4. Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Sugiyanto, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Dosen Penguji I, Dr. Mohammad Na'im, M.Pd., yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Pengurus PCNU Jember yang telah membantu pengumpulan sumber, motivasi, dan doanya demi terselesaikan skripsi ini;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan.....	8
1.6 Manfaat.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	20
BAB 4.FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI	
PARTISIPASIPOLITIK NAHDLTULULAMA CABANG	
JEMBERPADA MASA REFORMASI.....	31
4.1 Pengalaman Politik NU Cabang Jember	31
4.1.1 Kiprah Politik NU Tahun 1930-1966	31

4.1.2 Kiprah Politik NU pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1998	35
4.2 Perbedaan Panafsiran <i>Khittah</i> 1926	40
4.3 Keinginan NU untuk Kembali Berpolitik	47
4.4 Kondisi Geografis dan Tradisi Pondok Pesantren Kabupaten Jember	49
BAB 5. BENTUK PARTISIPASI POLITIK NAHDLATUL ULAMA CABANG JEMBER TAHUN 1998-2015	55
5.1 NU dan Tuntutan Politik pada Masa Reformasi	60
5.2 NU Cabang Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 1999-2000	57
5.3 NU Cabang Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2004-2005	62
5.4 NU Cabang Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2009-2010	69
5.5 NU Cabang Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2015	73
BAB 6. DAMPAK PARTISIPASI POLITIK NAHDLATUL ULAMA CABANG JEMBER TAHUN 1998-2015	79
6.1 Konflik Kepolitikan Elit NU Menjelang Pilkada	79
6.2 Munculnya Politik Kyai	86
6.3 Persaingan Politik Sesama Tokoh NU Cabang Jember	89
BAB 7. PENUTUP	95
7.1 Simpulan	95
7.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR LAMPIRAN

A. MATRIKS PENELITIAN	101
B. PEDOMAN WAWANCARA	102
C. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN	103
D. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA	105
E. SURAT KETERANGAN WAWANCARA	111
F. GAMBAR-GAMBAR	113
Gambar 01. Ketua Tim Lima KH. Abdullah Halim Muhammad Befoto Bersama KH. Ahmad Shiddiq.....	113
Gamabar 02. KH. Muhyiddin Abdusshomad Menjadi Juru Kampanye PKB di Puger	113
Gambar 03. Pelantikan MZA Djalal-Kusen Andalas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2010	114
Gambar 04. Sugiarto dan Faida Mengambil Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	114
Gambar 05. KH. As'ad Syamsul Arifin Tokoh NU Asal Situbondo Mendampingi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sugiarto-Dwikoryanto	115
Gambar 06. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Faida-Muqit Menggunakan Simbol NU untuk Menarik Perhatian Warga NU	115

DAFTAR TABEL

5.1 Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2000	62
5.2 Hasil Pemilihan Legislatif Jember Tahun 2004.....	64
5.3. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005	67
5.4 Hasil Pemilihan Legislatif Jember Tahun 2009	66

5.5 Hasil pemilihan kepala daerah Jember Tahun 201071
5.6 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Jember Tahun 201578



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah penyelenggaraan negara demokrasi sekaligus menjadi ciri khas adanya modernisasi politik. Menurut Damsar (2013:179) partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Bentuk partisipasi politik dapat berupa keikutsertaan memilih pemimpin suatu negara secara langsung maupun tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dalam bentuk keikutsertaan memilih pemimpin negara mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari kelompok orang atau organisasi, juga memiliki hak berpartisipasi politik. Meskipun NU didirikan oleh KH. Hasyim Asyari pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan atau non politik, namun dalam perkembangannya NU menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan politik. NU mulai peduli politik pasca kemerdekaan tahun 1949 dengan menolak perjanjian Renville, menolak perjanjian Linggarjati tahun 1948, serta menolak Konferensi Meja Bundar atau KMB tahun 1949. (Muzadi, 2006: 20).

Gerakan NU yang mengarah pada gerakan politik praktis tampak setelah bergabung dengan MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) tahun 1937. NU Melalui MIAI turut aktif bersama GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1939 menyuarakan tuntutan Indonesia berparlemen (Soon, 2008:97). Hal tersebut menjadi awal MIAI menuju tahapan-tahapan dinamis yang kemudian menjadi partai Masyumi. NU juga ikut menyalurkan aspirasi politiknya melalui Masyumi pada masa kemerdekaan.

Keanggotaan NU dalam Masyumi dihadapkan pada persoalan politik yang dianggap tidak menguntungkan NU. Masyumi dinilai telah melakukan manuver politik yang tidak disetujui NU, seperti terlibat dalam Darul Islam. Masyumi dinilai tidak pernah melibatkan NU dalam proses pengambilan keputusan penting partai. NU memilih keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik (PNU) pada tahun 1952. PNU memungkinkan mengaktualisasikan diri dalam percaturan politik. Hal ini dibuktikan dengan prestasi spektakuler PNU pertama dalam pemilu 1955. PNU mampu menempati peringkat ketiga perolehan suaranya setelah PNI dan Masyumi dengan perolehan 18,4 % suara dan 45 kursi di parlemen (Soon, 2008:97).

NU yang sudah menjadi Partai Nahdlatul Ulama semakin aktif mengurus persoalan politik praktis hingga tahun 1973. Pasca diberlakukannya kebijakan penyederhanaan partai politik oleh rezim orde baru pada tahun 1973. Tahun 1973 hanya ada dua partai politik yang diperbolehkan berkembang, yakni PDI, PPP, ditambah Golkar. PNU bersama Parmusi, PSII, dan Perti bergabung ke dalam PPP. Sedangkan PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik dan Parkindo bergabung ke dalam PDI. Kebijakan fusi partai politik tidak tuntas dikarenakan terdiri dari beberapa partai yang memiliki asas yang berbeda, yakni: nasionalis, sosialis, Katolik, dan Kristen. Kondisi fusi dalam PPP yang tidak menguntungkan NU akibat terus terjadi konflik internal. NU memilih menyatakan keluar dari PPP dan menyatakan menarik diri dari percaturan politik pada tahun 1984. Keputusan tersebut dipertegas dengan keputusan kembali ke *khittah* pada muktamar ke 27 di Situbondo tahun 1984 (Karim, 1983: 170).

Meskipun NU sudah menyatakan kembali ke *khittah* dengan tidak lagi mengurus persoalan politik, namun tuntutan politik pada masa reformasi tahun 1998 mengharuskan NU kembali mengurus politik. Hal tersebut disebabkan, karena adanya kesempatan bagi NU untuk menyatukan aspirasi warga *nahdliyin* yang menjadi kekuatan mayoritas di Indonesia. Sehingga perubahan peta politik tahun 1998 ini direspon oleh NU dengan cara salah satunya menggagas sebuah partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia kecil dalam rangka merumuskan pembentukan partai politik tersebut. NU membentuk Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tanggal 23 Juli 1998. PKB yang dibentuk NU, dianggap sebagai satu-satunya sayap politik resmi milik NU dengan alasan integralitas wadah penyaluran aspirasi warga NU (Ismail, 1999: 35).

Terbentuknya DPP PKB, langsung ditindak lanjuti oleh NU di semua tingkatan dari pusat hingga Cabang ikut mengapresiasi dengan mengupayakan terbentuknya DPP dan DPC PKB di wilayah dan Kabupaten, termasuk Nahdlatul Ulama Cabang Jember. NU Cabang Jember menindak lanjuti dengan membentuk DPC PKB Jember pada tanggal 30 Agustus 1998. Terdapat hal menarik dalam proses terbentuknya DPC PKB Jember. Pengurus Inti DPC PKB Jember langsung diambilkan dari Pengurus Harian PCNU Jember. Realitas tersebut juga terjadi hingga ke Dewan Pengurus Anak Cabang. Sehingga Ketua PCNU Jember otomatis sebagai Ketua DPC PKB Jember, sedangkan Ketua Majelis Wakil Cabang NU, otomatis menjadi Ketua PAC PKB Jember (Razak, 2012: 12).

Melalui DPC PKB Jember, NU Cabang Jember mulai menunjukkan perilaku yang kontradiktif dengan keputusan kembali ke *khittah*. Meskipun pola hubungan NU dengan PKB dapat ditarik garis tegas, pola hubungan tersebut tampak kabur ketika dihadapkan pada fakta partisipasi politik yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh NU Jember dan warga NU. Keterlibatan tokoh dan kader NU Jember dalam PKB, pada taraf tertentu dapat diartikan bahwa, NU Cabang Jember kembali ke dunia politik praktis. Tindakan para tokoh NU cukup mengindikasikan adanya kecenderungan pergeseran sikap, orientasi dan bahkan perilaku politik pada diri NU. Jika sejak keputusan kembali ke *khittah*, gerakan NU bercorak kultural dengan fokus gerakan pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat. Pasca terbentuknya DPC PKB Jember, perilaku politik NU lebih mengarah pada gerakan politik yang berorientasi struktural.

Pergeseran perilaku politik NU dapat dilihat dari keterlibatan tokoh NU yang secara inten memobilisasi warga NU guna menopang perolehan suara PKB pada Pemilihan Kepala Daerah Jember. Reposisi NU Cabang Jember dalam mengurus PKB sebagai sayap politiknya memunculkan pilihan dilematis. Satu sisi, NU Cabang

Jember ingin melepaskan diri dari PKB dan mencukupkan diri sebagai fasilitator terhadap pembentukan PKB sebagaimana komitmen awal. Namun di sisi lain, NU Cabang Jember secara moral harus ikut serta mempertahankan, mengembangkan dan membesarkan PKB. DPC PKB Jember tidak akan bisa menjadi partai besar tanpa adanya dukungan NU Cabang Jember. Hal tersebut dikarenakan modal sumberdaya manusia terbesar PKB terletak pada wargaNU (Razak, 2012: 14).

Keterlibatan tokoh NU Cabang Jember menjadi partisan, menunjukkan perubahan partisipasi politik kerakyatan menjadi politik kekuasaan. Meski partisipasi politik ini lebih bersifat personal bukan secara institusional yang melibatkan organisasi, namun dalam praktiknya sulit dipisahkan antara keduanya (Hasil wawancara dengan Junaidi, 3 Januari 2017). Hal tersebut dikarenakan tindakan personal atau kelompok yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU Cabang Jember mengusung simbol-simbol keorganisasian NU, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Bruinessen (1994:10), semangat praktis dan pragmatis yaitu suatu sikap dan pandangan yang memiliki kecenderungan kepada kepentingan-kepentingan politik sesaat seperti mendapatkan kedudukan dan atau jatah kekuasaan di pemerintahan. Keterlibatan tokoh NU Cabang Jember dalam politik praktis merupakan bentuk gerakan untuk berkompetisi memperebutkan dan atau turut mengatur distribusi kekuasaan sebagaimana lazimnya politik itu sendiri. Melalui DPC PKB, NU Cabang Jember berhasil mendudukkan Muchson Sudjono sebagai Ketua DPRD Jember tahun 1999 (DPRD, 2007: 191).

Meskipun NU Cabang Jember pada tahun 1999 dapat bersatu untuk memenangkan Muchson Sudjono. Namun pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 dengan sistem pemilihan langsung, tokoh NU Cabang Jember lebih terbuka menyikapi perkembangan politik. Sejak tahun 2005, tokoh NU tersebar di sejumlah partai politik. Bahkan pada tahun 2005, DPC PKB Jember yang dianggap satu-satunya partai berbasis NU terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama PKB yang berada di bawah kendali Gus Dur, dan PKB yang berada di bawah pengaruh

Muhaimin. Akibatnya meskipun calon yang diusung masing-masing PKB ini sama-sama dari kalangan *nahdliyyin*, kepentingan untuk membesarkan NU dikalahkan dengan kepentingan politik (Wahyu, 2005:16).

Tersebarinya tokoh NU Cabang Jember ke berbagai partai politik dalam mobilisasi massa melalui kampanye dengan memanfaatkan sentimen ideologis dan simbol-simbol keagamaan, serta pernyataan politik partisansdidukung penuh oleh para ulama NU, menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan. Upaya tersebut ditambah dengan kalimat persuasif bahwa memilihpasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh sejumlah Kyai NU Cabang Jember adalah wajib hukumnya (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Tokoh NU Cabang Jember terlibat sebagai tim pemenangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember. sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa NU Cabang Jember meskipun bukan organisasi politik namun tetap berpartisipasi secara sistematis dalam politik, baik oleh warga *nahdliyyin* secara umum maupun tokoh-tokoh struktural dalam kepengurusan NU Cabang Jember.

Partisipasi politik NU Cabang Jembersebagaimana dipaparkan di atas, menggugah peneliti untuk mengkaji lebih mendalam. Hal ini tidak terlepas dari realitas bahwa terdapatupaya distribusi tokoh-tokoh NU Cabang Jember sebagai tim pemenang pasangan calon yang diusung oleh partai yang berbeda-beda. Tentunya ini dilakukan bukan tanpa tujuan mengingat NU telah memiliki PKB sebagai partai yang pernah dibentuknya. Kenyataan yang demikian menggugah peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang dinamika perpolitikan Cabang Nahdlatul Ulama Jember sebagai bahan penulisan skripsi yang dirumuskan dengan kalimat judul, yaitu **“Partisipasi Politik Nahdlatul UlamaCabang Jemberpada Masa Reformasi Tahun 1998-2015”**.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepsi yang berbeda dalam memahami judul penelitian ini, oleh karena itu peneliti

perlu menegaskan pengertian judul Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015.

Menurut Damsar (2013: 179) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Ada dua Cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jember, yakni Nahdlatul Ulama Cabang Kencong dan Cabang Jember. Penelitian ini, mengkaji partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 dengan mengesampingkan adanya dua unsur organisasi NU Cabang yang ada di Kabupaten Jember. Sebab, menurut hemat peneliti, secara kultural masing-masing Cabang NU yang terdapat di Jember merupakan satu kesatuan. Peneliti dalam merekonstruksi partisipasi Nahdlatul Ulama dengan menjadikan satu kesatuan antara atribut atau simbol NU. NU hanyalah tanda, bukan tujuan, sementara pengurus hanyalah pengelola, bukan pemilik. Sehingga tindakan yang dilakukan tokoh, oknum, maupun warga yang di dalamnya melekat nilai-nilai NU dikategorikan NU. Sebab, saat tokoh NU, oknum, maupun warga selalu beraktifitas politik menjadikan NU sebagai nilai tawar tersendiri.

Masa reformasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan sistem tata kenegaraan yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie (Soon, 2007: 141).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud partisipasi politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 ialah segala bentuk

kegiatan NU Cabang Jember yang mengarah pada upaya mempengaruhi kebijakan, keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jember.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan uraian dari permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti memberi batasan pembahasan yang akan penulis sajikan, yaitu meliputi lingkup temporal, spasial dan materi. Lingkup temporal dalam materi ini ialah pada masa reformasi tahun 1998-2015.

Pemilihan waktu masa reformasi 1998 dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi politik pada masa tersebut yang memberikan kebebasan mendirikan organisasi politik. NU menyikapi kondisi sosial politik tersebut dengan membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan tahun 2015 dipilih oleh peneliti dikarenakan tepat pada waktu pelaksanaan Mukhtamar NU ke-33 di Jombang. Pelaksanaan Mukhtamar ke-33 dijadikan batas akhir lingkup temporal pada penelitian ini dikarenakan pelaksanaan mukhtamar ke 33 tersebut merupakan penanda berakhirnya kebijakan kepengurusan selama satu periode.

Ruang lingkup spasial atau tempat yang dikaji dalam penelitian ini ialah lingkup daerah Jember Jawa Timur. Pengambilan lingkup daerah Jember Jawa Timur dilatar belakangi karena sebagai bagian daerah yang masuk dalam lingkup wilayah tapal kuda meliputi: Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, warga NU Cabang Jember dikenal militan dan memiliki multikultur yang berpengaruh pada dinamika partisipasi politik. Alasan lain adalah banyaknya kajian tentang politik NU umumnya dilakukan pada lingkup nasional, dan masih sedikit yang mengangkat perkembangan gerakan NU daerah atau Cabang.

Ruang lingkup materi pada penelitian membatasi pada proses partisipasi politik NU Cabang Jember pada pemilihan kepala daerah atau Bupati Kabupaten Jember. Sementara partisipasi politik NU Cabang Jember pada tataran Pemilihan Gubernur dan presiden tidak termasuk dalam Pembahasan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) apa saja faktor yang melatarbelakangi NU Cabang Jember berpartisipasi politik pada masa reformasi ?
- 2) bagaimana bentuk partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi 1998-2015?
- 3) bagaimana dampak sosial politik adanya partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi 1998-2015?

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

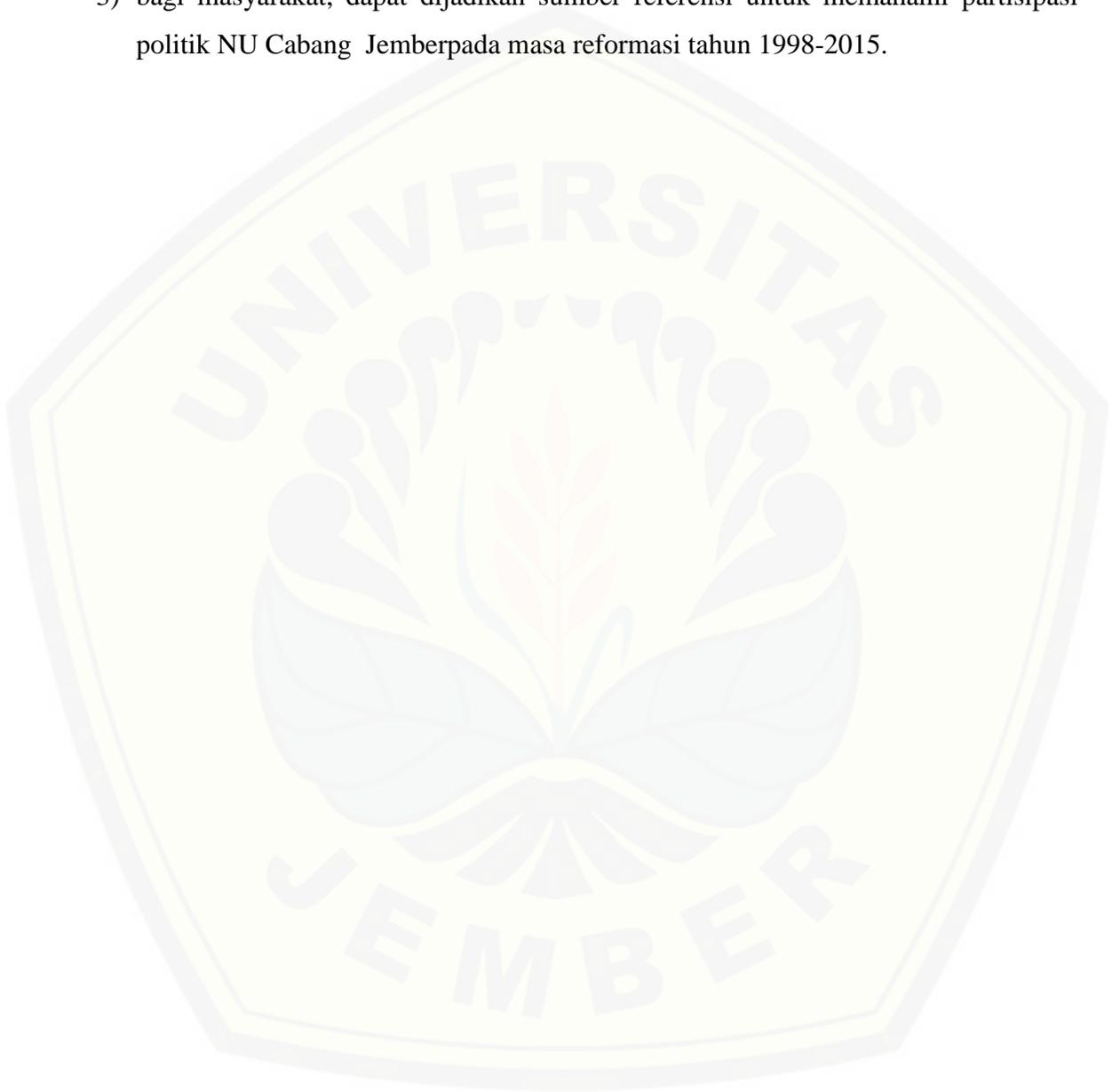
- 1) menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi NU Cabang Jember berpartisipasi politik pada masa reformasi
- 2) menganalisis bentuk partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi 1998-2015,
- 3) menganalisis dampak sosial politik partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi 1998-2015.

1.6 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi semua kalangan masyarakat, sehingga berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang tersaji diatas, maka hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) bagi penulis, melatih daya pikir, analisis dan objektif mengenai partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 dalam bentuk karya ilmiah,

- 2) bagi NU Cabang Jember, untuk dijadikan sumber referensi agar kembali menggiatkan program sosial keagamaan bukan lebih sering mengurus politik,
- 3) bagi masyarakat, dapat dijadikan sumber referensi untuk memahami partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi tinjauan pustaka, yaitu dikemukakan beberapa hasil *review* sumber yang berkaitan dengan partisipasi politik Nahdlatul Ulama, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, misal berupa laporan penelitian dan skripsi. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, studi tentang kiprah NU dalam perpolitikan sudah pernah dilakukan baik oleh akademisi, penulis, pemerhati, intelektual, dan ilmuwan baik dalam maupun luar negeri.

Faisal Ismail dalam bukunya yang berjudul *NU, Gus Durisme dan Politik Kyai* membahas mengenai terjadinya fenomena unik pada NU Pasca runtuhnya Orde Baru dalam hal berpolitik. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai perubahan peta sosial-politik yang direspon NU dengan cara, menggagas sebuah partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia kecil dalam rangka merumuskan pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena alasan integralitas wadah penyaluran aspirasi warga NU, PKB lantas diklaim sebagai satu-satunya sayap politik resmi milik warga NU. Peneliti menilai bahwa buku tersebut hanya berkisar pada pembahasan mengenai pembentukan partai PKB oleh NU dan kiprah NU dalam PKB dalam lingkup nasional. Sedangkan keterkaitan dengan NU tingkat Cabang belum dibahas.

Kang Young Soon dalam bukunya yang berjudul *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitan Nahdlatul Ulama* membahas tentang perjalanan Politik NU dari tahun 1984 hingga suksesi kepemimpinan nasional tahun 1999 di Indonesia. Peneliti menilai bahwa buku ini memiliki cakupan kongkrit mulai dari tradisi pemikiran NU sampai terjadinya konflik kepolitikan internal NU dalam lingkup nasional Indonesia. Selain itu juga menguraikan terjadinya kesenjangan antara NU dengan PKB. Buku ini cukup memberikan gambaran umum untuk menganalisis tentang NU tingkat Cabang, termasuk NU Cabang Jember. Kekurangan dalam buku tersebut selain lingkup

nasional juga tentang cakupan waktu yang kurang memadai. Buku tersebut hanya mencakup periodisasi dari tahun 1984-1999.

Anwar dalam bukunya yang berjudul *Avonturisme NU; Menjejaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin*) membahas tentang kiprah NU di kancah politik praktis dan pemikiran para elite politik di lingkungan NU. Juga interaksi dinamis yang berkaitan erat dengan terjadinya sikap dan perilaku politik para elite politik di lingkungan NU. Peneliti menilai buku tersebut cukup mengupas terjadinya konflik internal NU sebagai awal dari pendewasaan NU menuju keterbukaan politik. Kekurangan buku tersebut belum membahas tentang upaya distribusi tokoh NU dalam partai politik yang berbeda-beda.

Suparyogo dalam bukunya yang berjudul *Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyai* berusaha menelusuri jejak-jejak keterlibatan kyai dalam politik. Keterlibatan kyai dalam politik harus dilihat dalam perspektif relasi antara Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Terlepas dari perdebatan konseptual dan interpretasi terhadap relasi Islam dan politik, sesuatu yang niscaya adalah bahwa seharusnya kyai tetap mengemban misi *amar ma'ruf nahi munkar*. Buku tersebut secara tegas memaparkan peran kyai dalam dinamika politik, namun belum mengarah pada konstruksi peristiwa NU dalam konteks lokal.

Badrun Alaena dalam bukunya yang berjudul *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* membahas bahwa pergeseran perilaku politik NU juga bisa dilihat dari keterlibatan tokoh-tokoh NU yang secara intens memobilisasi massa *nahdliyyin* guna menopang perolehan suara PKB pada Pemilihan Umum tahun 1999 sebagaimana amanat hasil rapat pleno PBNU ke-4 tanggal 24 Juli 1998 di Jakarta. Buku ini memaparkan tentang adanya perilaku NU yang tidak patuh pada keputusan *khittah* 1926. Kekurangan buku tersebut, lebih terfokus pada penyimpangan-penyimpangan NU dari garis *khittah* 1926. Sedangkan bahasan mengenai politik santun dan demoratis belum dibahas yang dilakukan NU belum dibahas.

Muchith Muzadi & Hasyim Muzadi dalam bukunya yang berjudul *Jatidiri PKB* menjelaskan perilaku politik NU dikatakan kontra-produktif dengan pola perilaku

politik NU pasca Khittah yang memutuskan untuk menarik diri dari percaturan politik praktis, dan kembali kepada garis perjuangan semula yakni sebagai organisasi sosial-keagamaan, serta aktivitas perpolitikan NU yang banyak diorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*) dalam kerangka kontrol terhadap kekuasaan (*moral force*). Namun demikian, tindakan NU untuk turut membidani kelahiran PKB dan keterlibatan politik di dalam partai itu tidak serta merta dapat dijadikan dalih untuk menjustifikasi bahwa NU telah berpolitik praktis dan mengingkari Khittah tersebut. Sebab, NU sendiri telah membuat garis pembatas yang sangat tegas dimana hubungan antara NU dan PKB hanyalah bersifat moral, kultural, historis, aspiratif, bukannya bersifat struktural. Peneliti menilai bahwa buku tersebut cukup untuk dijadikan rujukan mengenai partisipasi politik NU yang hakikatnya tidak bertentangan dengan *khittah*, bahkan menguatkan. Kekurangan buku tersebut meskipun diterbitkan oleh penerbit lokal Jember belum membahas NU Cabang Jember.

Imam Nahrawi dalam bukunya yang berjudul *Moralitas Politik PKB (Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern)* mengurai moralitas politik yang berkembang di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang *notabene* di *back-up* oleh para kyai pesantren NU. Bagaimana kultur pesantren NU yang tradisional mampu mewarnai perjalanan politik PKB- mulai dari awal berdirinya PKB hingga mengagendakan pewarisan estafet kepemimpinan sampai penentuan visi dan program kerja ke depan. Buku ini cukup untuk dijadikan rujukan untuk menganalisis keterkaitan tokoh-tokoh NU dalam mengurus politik. Kekurangan buku tersebut belum membahas tentang perbedaan pandangan politik tokoh NU.

Khairudin dalam bukunya berjudul *Menuju Partai Advokasi* membahas pola hubungan NU dengan PKB. PKB sebagai partai yang lahir dari rahim NU, baik secara struktural maupun kultural, PKB mewarisi NU. Secara struktural, dalam organisasinya PKB memiliki dua institusi, yakni Dewan Syuro sebagai institusi penentu kebijakan umum dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksana kebijakan partai.

Hal ini persis sebagaimana yang ada di NU, yakni Lembaga Syuriyah dan Tanfidziyah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bruinessen dalam bukunya yang berjudul *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* membahas berdasarkan kesaksian mata penulis saat menghadiri Muktamar NU ke 30 di Kediri pada November 1999. Menurutnya, para pemimpin NU lokal yang berkumpul di sana sangat bersuka cita dengan kembalinya pemimpin mereka kepada “politik praktis” setelah kurang lebih 15 tahun menunggu. Para pemimpin NU lokal ini terkesan sangat berambisi untuk kembali kepada politik patronase 1950 dan 1960-an. Bahkan, banyak delegasi yang mengharapkan terciptanya hubungan yang formal antara NU dan PKB, atau alternatifnya mengubah NU menjadi partai politik lagi. Peneliti menilai bahwa buku ini cukup untuk mengungkap tentang potensi politik NU meskipun NU bukan organisasi politik. Kekurangan dalam buku tersebut belum membahas mengenai upaya distribusi tokoh NU ke dalam partai politik yang berbeda-beda.

Achmad Azmi Musyaddad dalam skripsinya yang berjudul *NU dan Politik*, menunjukkan bahwa PCNU Gresik menganggap *khittah* NU tidak menghalangi NU berpolitik. Implementasi *Khittah* NU dimanifestasi dengan menempatkan kader NU sebagai Calon Bupati melalui Musyawarah Kerja II, hingga akhirnya terpilih Ketua PCNU Gresik sebagai calon Bupati dari NU. Bentuk keterlibatan PCNU Gresik dengan melakukan konsolidasi internal jam’iyyah lewat surat instruksi, pembentukan panitia Sembilan sebagai tim sukses NU, dan memanfaatkan gambar lambang serta aset NU. *Khittah* NU menjadi alat legitimasi NU untuk berpolitik. Keputusan PCNU Gresik dalam mendukung pencalonan Ketua PCNU Gresik dipatuhi dan dijalankan oleh perangkat organisasi NU Gresik, sehingga tidak ada penolakan atau perbedaan pandangan diantara pengurus untuk mendukung Ketua PCNU sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Gresik 2010. PCNU Gresik menjadi elit yang keputusannya dipatuhi oleh seluruh perangkat organisasi

NU di Gresik. Skripsi ini membantu peneliti mengungkap partisipasi politik NU tingkat lokal meskipun tidak membahas lingkup Jember.

Abdul Latif Najmuddin dalam tesisnya yang berjudul *NU dalam Ruang Politik; Khittah dan Persaingan Elit di Jember Pasca Orde Baru* menjelaskan bahwa terjadi pergeseran perilaku politik elit NU Jember dari politik moral yang berwawasan kebangsaan yang ditanamkan *khittah* ke arah politik praktis-pragmatis yang berorientasi kekuasaan semata. Dalam konteks demikian ini, aktor sosial NU Jember yang meliputi tokoh-tokohnya, kelompok muda terdidik dan para warga NU Jember secara kolektif merespon perubahan peta-sosial politik bangsa era pasca Orde Baru dengan mendirikan dan mengembangkan partai politik (PKB). Peran yang dimainkan para aktor sosial kewargaan NU Jember tidaklah sama. Tokoh-tokoh NU Jember dikenal sebagai kelompok elit keagamaan yang memiliki peranan dominan dalam menentukan sikap dan tindakan politik NU Jember, sehingga timbul bermacam kepentingan dan menyebabkan persaingan antar elit NU dalam politik praktis. Persaingan, intrik, serta konflik yang terjadi akibat keterlibatan para elit NU Jember dalam politik, mendapatkan banyak kritikan dari kalangan NU Jember sendiri, mayoritas dari mereka berpendapat bahwa para elit NU Jember tidak konsisten dengan landasan politik yang ditanamkan oleh *khittah*. Bahasan dalam penelitian ini cukup untuk menganalisis terjadinya konflik internal maupun konflik NU dengan PKB. Kekurangan buku tersebut hanya memperhatikan pada sisi pragmatis NU Cabang Jember dalam politik. Sementara orientasi dan alasan rasional keterlibatan NU Cabang Jember belum dibahas.

Abdul Chalik dalam disertasi yang berjudul *Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru; Studi Partisipasi Politik Elit Nahdlatul Ulama Jawa Timur* menjelaskan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh elit NU Jawa Timur meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan baik dalam tingkat eksekutif maupun legislatif. Sedangkan budaya politik elit NU Jawa Timur terbentuk oleh pergumulan budaya besar (mayor) dan kecil (minor) yang cukup panjang dan intens, baik berasal dari tradisi Islam

maupun Kejawen. Hasil dari pertemuan ini, melahirkan beberapa varian subkultur di Jawa Timur, yakni; budaya pesisiran, Mataraman, Arek, Madura dan Pendalungan.

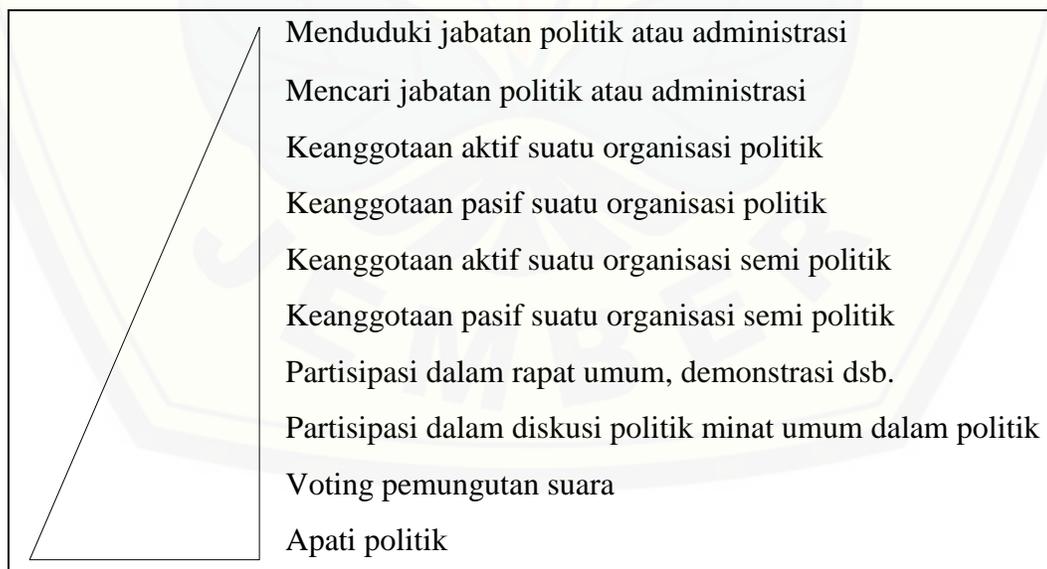
Abdul Haris dkk dalam laporan penelitiannya yang berjudul *Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama di Era Multi Partai Pasca Orde Baru* menjelaskan bahwa tindakan NU Jember dalam melakukan persinggungan dengan persoalan politik praktis, mulai dari keterlibatannya dalam proses pembentukan PKB; mobilisasi massa pada Pemilu 1999 dalam rangka *back up* Abdurrahman Wahid; pemilihan Bupati Jember tahun 2000, merupakan fakta empirik yang menunjukkan terjadinya pergeseran perilaku politik kultural pada diri NU Jember pasca Orde Baru. Jika sejak tahun 1984, aktivitas perpolitikan NU Jember lebih berorientasi kepada aspek kualitatif, maka pasca pembentukan PKB tahun 1998, orientasi NU lebih kepada aspek kuantitatif dengan target turut terlibat dalam *power sharing*. Bahasan tentang pergeseran NU Cabang Jember pada penelitian ini belum membahas mengenai dinamika politik NU Cabang Jember sejak pasca reformasi 1998-2015.

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka yang diuraikan di atas, penulis berkesimpulan bahwa belum ada satu buku maupun literatur yang mengkaji secara spesifik tentang partisipasi politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015. Maka dari itu, peneliti merasa perlu merekonstruksi tentang hal tersebut secara spesifik dan mendalam.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam proses rekonstruksi sejarah tentang partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 adalah pendekatan sosiologi politik. Menurut Damsar (2013:13) sosio politik didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena politik. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metodologi yang digunakan yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan politik. Pendekatan sosiologi politik tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis peristiwa sejarah tentang partisipasi politik Cabang NU Jember.

Menurut Rush & Althoff 2003 (dalam Damsar, 2013:180), partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik.

Peneliti menggunakan bentuk partisipasi politik yang dikemukakan Rush & Althof untuk menganalisis tipe partisipasi politik Cabang NU Jember. Menurut Rush & Althof 2003 (dalam Damsar, 2013:185), hierarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hierarki tertinggi dalam partisipasi politik adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati politik total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik, maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang. Tipologi tersebut relevan untuk membahas mengenai partisipasi politik NU Cabang Jember. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa tokoh NU Jember tersebar di berbagai organisasi, sedangkan warga NU *nahdliyyin* Jember secara umum bersifat heterogen, mulai dari yang peduli politik sampai yang tidak peduli politik. Berikut digambarkan dalam bagan partisipasi politik berikut. Garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontal menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.



Tabel 2.1 Partisipasi Politik Rush & Philip Althoff 2003

Sumber: Rush & Althoff 2003 (dalam Damsar, 2013:185).

Penelitian ini tidak merekonstruksi semua pokok pikiran dalam teori partisipasi politik sebagaimana yang dikemukakan Rush dan Althof. Tetapi peneliti hanya menekankan pada bentuk partisipasi politik yang meliputi: usaha mencari jabatan politik atau administrasi yang dilakukan tokoh NU Cabang Jember, keanggotaan aktif tokoh NU Cabang Jember dalam suatu organisasi politik, bentuk partisipasi dalam rapat umum dan demonstrasi, serta voting pemungutan suara yang melibatkan sejumlah tokoh NU Cabang Jember.

Partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 ditandai dengan adanya beberapa tokoh ulama atau tokoh politik NU yang berafiliasi terhadap beberapa partai politik meskipun NU telah mendirikan PKB. Berangkat dari asumsi tersebut, maka peneliti menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*) yang dicetuskan oleh Coleman. Meskipun teori pilihan rasional berakar kuat pada pemahaman ekonomi yang merasionalkan pilihan pada tingkatan efisiensi yang dicapai dari sebuah proses tindakan seseorang maupun secara kolektif. Namun demikian, dalam perkembangannya teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk di dalamnya bidang kajian yang berhubungan dengan politik.

Orientasi besarnya pilihan rasional Coleman memiliki ide dasar bahwa orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan yang dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Para aktor akan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka memaksimalkan manfaat, keuntungan serta pemuasan pada kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu ada dua unsur yang harus ada dalam teori ini yaitu aktor dan sumber daya. Tentu sumber daya yang dimaksud dapat dikontrol oleh sang aktor (Ritzer, 2014:369).

Beberapa contoh kasus yang digunakan oleh Coleman untuk memperjelas bagaimana teori pilihan rasional antara lain: Pertama adalah perilaku kolektif, perilaku kolektif adalah isu makro yang dapat dilihat dari sisi mikro individu pelakunya. Perilaku kolektif muncul karena aktor menilai perlu menyandarkan kepentingan atau tujuannya kepada individu lain agar mendapat keuntungan yang

maksimal tanpa harus melakukan usaha yang besar. Kedua adalah norma-norma, norma dalam kelompok sosial adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor agar individu lain mengontrol kendali dari aktor agar efektifitas menjadi meningkat dan memunculkan konsensus yang mencegah ketidak seimbangan. Ketiga adalah aktor korporat, munculnya seorang aktor korporat adalah upaya dari kelompok sosial untuk mendorong sang aktor secara bersama-sama. Ketika aktor berkompetisi dalam pemilihan maka proses pemungutan suara individu-individu adalah isu mikro menuju makro(Coleman dalam Ritzer, 2014: 370-371).

Fokus teori pilihan rasional adalah para pelaku. Para pelaku dipandang sebagai entitas yang memiliki tujuan atau maksud. Hal ini berarti bahwa para pelaku memiliki batas akhir atau tujuan dari tindakan-tindakannya. Para pelaku juga memiliki pilihan atau preferensi. Dengan demikian, pilihan rasional tidak berkaitan dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan tersebut, atau sumber-sumbernya. Hal terpenting dalam hal ini adalah fakta bahwa tindakan para pelaku untuk mencapai tujuan-tujuan yang konsisten dengan hierarki preferensi seorang pelaku (Wirawan, 2012: 244-245).

Teori Pilihan Rasional Coleman menekankan bahwa seorang melakukan sebuah tindakan dalam upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, tindakan tersebut merupakan tindakan purposif atau bertujuan. Terdapat dua hal penting dalam teori pilihan rasional Coleman. Pertama adalah aktor dan yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah suatu wadah yang akan digunakan oleh aktor tersebut untuk mendukung tindakannya dalam mencapai sebuah tujuan secara rasional. Namun, tindakan rasional seseorang kadang dipandang tidak rasional menurut orang lain. Tindakan rasional seseorang tidak bisa diukur dari sudut pandang orang lain tapi dari sudut pandang orang yang melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan pandangan tersebut, sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partai politik digunakan sebagai motor dalam proses partisipasi politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember.

Berdasarkan uraian tentang teori pilihan rasional di atas, peneliti menganggap bahwa teori pilihan rasional mampu menganalisis secara obyektif, dari pada sekedar

penjelasan yang bersifat formal-normatif yang menjadi ciri paradigma dominan dalam ilmu politik tradisional. Teori pilihan rasional juga dianggap lebih mampu memberikan rekomendasi yang bersifat lebih generik dan praktis, daripada pendekatan tradisional yang biasanya hanya mampu memberikan rekomendasi yang bersifat abstrak dan makro.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang berusaha mengkaji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari masa lampau yang diperoleh melalui metode penelitian sejarah. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang ditulis Kontowijoyo. Menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1995: 90), metode penelitian sejarah terdiri dari lima tahap, antara lain; pemilihan topik, heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan historiografi. Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pemilihan topik yaitu menentukan permasalahan yang dikaji. Sebuah penelitian sejarah, topik yang dipilih adalah kesejarahan yang *workable*, yaitu dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Pemilihan topik penelitian ini telah dipertimbangkan dengan beberapa faktor pendukung untuk menyelesaikan penelitian. Faktor tersebut antara lain adalah minat dan kemampuan penulis untuk menyelesaikan penelitian. Selain itu, peneliti merasa perlu untuk merekonstruksi permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi politik Cabang Nahdlatul Ulama Jember, karena beberapa literatur yang pernah peneliti baca belum membahas secara spesifik tentang partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015.

Peneliti dalam memilih topik partisipasi politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 dilatar belakangi oleh adanya beberapa penelitian terdahulu yang merekonstruksi tentang aktivitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU Cabang Jember yang terlibat secara langsung dalam perpolitikan. Meskipun partisipasi politik tersebut tidak dilakukan secara institusional maupun struktural, namun tindakan tersebut kerap kali dilakukan dengan menggunakan simbol NU. Berangkat dari asumsi ini, peneliti bermaksud merekonstruksi partisipasi politik

NU Cabang Jember dengan pertimbangan tersebut maka penulis telah merumuskan tema bahasan, yaitu partisipasi politik Cabang Nahdlatul Ulama Jember pada masa roformasitahun 1998-2015.

Selanjutnya, peneliti melakukan proses heuristik. Menurut Kuntowijoyo (1995:73), sumber sejarah dibagi menjadi dua, antara lain: sumber tertulis dan tidak tertulis atau dokumen dan *artifact*. Sumber merupakan segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung menceritakan tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu.

Penulis mencari dan mengumpulkan sumber tertulis atau dokumen berupa buku, hasil musyawarah, surat kabar maupunsurat-surat berhubungan dengan partisipasi politik Cabang NU Jember. Peneliti mencari di perpustakaan Universitas Jember, koleksi pribadi, koleksi yang ada di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember, di kantor PKB DPC Jember, di kantor Gerakan Pemuda Anshor Jember, dan dokumen yang terdapat pada situs-situs resmi (*website*) NU. Peneliti mengunjungi KPU Jember untuk memperoleh data partai politik Cabang Jember, hasil pemilihan Bupati Jember tahun 1998-2015, serta data partai politik yang berpartisipasi di dalamnya.

Peneliti membagi sumber tertulis atau dokumen menjadi duakategori berdasarkan sifat, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata partisipasi politik NU Cabang Jember. Penulis menggunakan sumber Arsip Nahdlatul Ulama yang tersimpan di PCNU Jember.

Penelusuran sumber primer yang tidak terdapat dalam dokumen dilakukan dengan mencari pelaku dan saksi sejarah yang terlibat langsung dalam proses partisipasi politik NU Jember. Pelaku dan saksi sejarah ini merupakan narasumber yang akan memberikan kelengkapan informasi kepada penulis yang tidak terdapat dalam sumber tertulis. Menurut Koentjaraningrat (1986: 138-139), terdapat dua teknik dalam melakukan wawancara, antara lain:

- 1) wawancara berstruktur atau berencana yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua responden yang diseleksi untuk diwawancara diajukan pertanyaan yang sama dengan kata-kata dan tata urutan yang seragam.
- 2) wawancara tidak berstruktur atau tidak berencana adalah wawancara yang tidak mempunyai suatu persiapan sebelumnya dari suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata dan tata urut tetap yang harus dipatuhi peneliti.

Peneliti melakukan kedua hal tersebut dengan tujuan saling melengkapi. Wawancara berstruktur berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Wawancara tidak berstruktur dilakukan dengan tujuan agar setiap pertanyaan dapat dikembangkan dari jawaban yang dikemukakan, sehingga dapat diperoleh suatu informasi yang mudah diolah dan tujuan dari wawancara tersebut lebih terfokus.

Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan peneliti untuk menentukan pelaku dan saksi sejarah sebagai narasumber. Selain memperhatikan faktor mental, fisik, dan perilaku. Sebab, pemilihan saksi maupun pelakusejarah sebagai narasumber yang tepatmudah. Sehingga penulis melakukan peninjauan dan penentuan sumber informasi terlebih dahulu.

Peneliti menggali informasi dari nara sumber terkait. Untuk melengkapi proses wawancara tersebut, sebelumnya penulis telah mempersiapkan alat-alat penunjang seperti alat tulis, tape recorder, kamera. Adapun pokok pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber adalah berkaitan dengan informasi tentang partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015, kondisi sosial dan politik yang ikut mempengaruhinya, proses NU Cabang Jember sehingga tokoh NU Cabang Jember berafiliasi dengan partai politik yang berbeda-beda, serta bagaimana NU Cabang Jember secara struktural menyikapi hal tersebut.

Peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh NU Cabang Jember yang berperan aktif dalam kiprah perjalanan NU Cabang Jember dari masa ke masa. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan minimnya sumber tertulis yang

secara khusus membahas partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015. Beberapa tokoh yang dijadikan informan antara lain: Nurhasan mantan Wakil Ketua PCNU Jember tahun 2005, serta Ayub Junaidi sebagai narasumber dari kalangan tokoh Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Dewan Pembina GP Anshor Cabang Jember tahun 2011.

Pemilihan Nurhasan sebagai informan karena upayanya sebagai Wakil Ketua PCNU Jember dalam membela kepentingan politik NU Cabang Jember, meski di lain pihak sebagai Ketua IKAPMII Cabang Jember yang menolak PCNU Jember terjun ke dunia politik. Sementara Ayub Junaidi dalam kiprahnya sebagai Ketua GP Anshor Cabang Jember melarang semua calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan simbol NU selama kampanye. Padahal Calon yang diusung koalisi PKB yang di dalamnya Ayub Junaidi menjabat Sekretaris Umum, justru menggunakan simbol NU.

Sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dikelompokkan menjadi sumber primer

Sumber yang bersifat primer antara lain:

- 1) gambar kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi politik Cabang NU Jember
- 2) perolehan suara partai politik pada pemilihan Bupati Jember tahun 2000-2015,
- 3) wawancara terhadap pelaku dan saksi partisipasi politik NU Cabang Jember tahun 1998-2015,
- 4) Muzadi, H & Muzadi, A.M. 1999. *Jatidiri PKB*. Jember: Perc. Offset Nuris.
- 5) Muzadi, A.M. 2003. *Apa dan Bagaimana Nahdlatul Ulama*. Jember: PC NU. .

Peneliti melakukan penelusuran sumber tertulis yang bersifat sekunder. Sumber sekunder dihimpun dari kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata atau orang yang tidak hadir langsung dalam partisipasi politik NU Cabang Jember. Peneliti menghimpun sumber sekunder dari berbagai tempat atau instansi. Tempat atau instansi yang dikunjungi peneliti antara lain: perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan IAIN Jember, perpustakaan *on line* UGM.

Sumber tertulis yang bersifat sekunder antara lain:

- 1) Najmuddin, A.L. 2007. "NU dalam Ruang Politik; Khittah dan Persaingan Elit di Jember Pasca Orde Baru." Tidak Diterbitkan. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana UGM.
- 2) Disertasi Chalik, A. 2008. "Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru; Studi Partisipasi Politik Elit Nahdlatul Ulama Jawa Timur." Tidak Diterbitkan. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- 3) Haris, A. dkk. 2002. "Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru." Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember: STAIN Jember.

Langkah selanjutnya peneliti melakukan kritik sumber. Menurut Kuntowijoyo (1995:89), kritik sumber merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti sejarah untuk menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan secara kritis agar terjaring fakta yang menjadi pilihan, baik terhadap materi sumber maupun terhadap substansi sumber. Peneliti dalam hal ini tidak serta merta menerima seutuhnya sumber-sumber yang ia dapatkan. Setelah mencari berbagai sumber sejarah, kemudian peneliti melakukan pemilihan dan penyaringan terhadap sumber-sumber tersebut. Dalam hal ini yang diuji adalah tentang keaslian sumber dan kesahihan sumber. Peneliti melakukan dua teknik kritik sumber, yakni eksternal dan internal.

Penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber tertulis. Menurut Sjamsudin (2007:118) kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Ketika peneliti melakukan kritik eksternal terhadap sumber-sumber yang akan digunakan, penulis menganalisis dan menelaah secara seksama terhadap sumber-sumber yang ada sehingga unsur latar belakang penulis, penerbit, tahun terbit, dan keasliannya dapat diketahui.

Unsur latar belakang atau asal usul penulis sumber menjadi salah satu pertimbangan peneliti dalam memilih sumber yang memberikan informasi. Hal seperti itu dijadikan sebagai salah satu indikator yang ditelaah karena setiap informasi yang diberikan memiliki sudut pandang pribadi atau subjektivitas dari para penulisnya.

Berdasarkan latarbelakang atau asal usul penulis yang karya-karyanya digunakan sebagai sumber dalam skripsi ini, dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu :

- 1) penulis yang berasal dari kalangan NU struktural ,
- 2) penulis yang berasal dari kalangan NU kultural,

Pengelompokan di atas dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam memahami dan sekaligus menilai sumber. Kritik sumber dilakukan dengan membandingkan tulisan diantara masing-masing penulis sumber. Dengan demikian, dapat dilihat makna tulisan tersebut terdapat perbedaan atau tidak, pokok-pokok pikiran apa sajakah yang terkandung di dalamnya, serta unsur subjektifitas dari penulis berdasarkan instansi yang melatarbelakangi penulisan.

Peneliti melakukan kritik internal yang berkaitan dengan isi dari sumber, agar sumber-sumber yang diperoleh penulis dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak. Keputusan ini didasarkan atas penemuan dua penyidikan (*inkuiri*) yaitu : Arti sebenarnya dari kesaksian itu harus dipahami. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh penulis (sumber) dan sumber itu harus memiliki kredibilitas yang tinggi (Sjamsudin, 2007:111). Oleh karena itu langkah penulis dalam memilih sumber yang berupa tulisan seteliti mungkin dan memperhatikan dua penyelidikan yang telah disinggung di atas. Unsur asal usul dan latar belakang penulis menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai sumber yang memberikan informasi. Dijadikannya hal tersebut diatas sebagai salah satu indikator yang harus diperhatikan karena setiap informasi yang diberikan atau dituangkan penulis kedalam bukunya akan memiliki subjektifitas dari para penulisnya.

Peneliti juga melakukan kritik terhadap sumber lisan yang akan di gunakan. Hal ini dilakukan karena tidak semua data-data yang diberikan oleh nara sumber dapat dipakai dalam penulisan peristiwa sejarah. Kritik yang digunakan adalah kritik eksternal dan kritik internal. Penggunaan kritik eksternal terhadap nara sumber dilakukan karena mempertimbangkan beberapa hal yang diantaranya faktor usia nara sumber dan kaitannya dengan peristiwa yang dikaji. Selain menggunakan kritik eksternal, kritik internal juga digunakan dalam melakukan kritik terhadap sumber

lisan. Kritik internal lebih menekankan pada informasi yang disampaikan. Kritik internal terutama mempertanyakan tiga hal pokok, yaitu :

- 1) apakah pembuat kesaksian “mampu” memberikan kesaksian, yang menyangkut antara lain hubungannya dengan peristiwa yang diteliti (apakah informan melihat atau ikut terlibat atau hanya mendengar dari orang lain peristiwa yang dilaporkannya); demikian juga dengan derajat kewenangan dalam peristiwa itu (tentu akan berbeda antara sumber informasi sebagai tokoh dengan orang biasa).
- 2) apakah informan “bersedia” memberikan informasi yang benar. Ini menyangkut kepentingan penulis terhadap peristiwa tersebut.
- 3) apakah informan mempunyai alasan untuk menutup-nutupi segala sesuatu peristiwa atau untuk melebih-lebihkannya.

Kritik internal dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya isi dari sumber-sumber yang diperoleh itu untuk dijadikan bahan penulisan skripsi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan kritik internal ini adalah sebagai berikut: penulis melakukan kritik hasil wawancara ini dengan cara melihat konsistensi internalnya, yaitu semakin konsisten yang memberikan informasi, maka makin tinggi tingkat reliabilitas dan kredibilitas yang terkandung dalam peristiwa yang dipaparkan oleh nara sumber. Hal tersebut perlu dilakukan dengan pertimbangan adanya beberapa nara sumber yang kurang bisa menerangkan kejadian peristiwa secara kronologis dan jelas mengingat terbatasnya ingatan dari nara sumber berkenaan dengan peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena peristiwa itu sudah lama terjadi dan usia nara sumber sudah tua.

Kritik internal terhadap sumber lisan dilakukan dengan melihat latar belakang nara sumber. Informan pertama yaitu, Nurhasan sebagaipelaku sekaligus saksi sejarah, karena terlibat secara langsung dengan peristiwa yang dikaji dan merupakan penduduk asli Kabupaten Jember.Selanjutnya peneliti melakukan kaji banding atau *cross checking*, yaitu membandingkan nara sumber yang satu dengan yang lainnya dalam peristiwa yang sama atau membandingkan antara nara sumber dengan sumber-sumber tertulis yang relevan.

Penulisan mengenai partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015 dianalisis secara mendalam. Hal tersebut merupakan hasil kritik peneliti terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh baik primer ataupun sekunder melalui kritik intern dan eksteren untuk mendapatkan keaslian dan kesahihan dari sumber-sumber yang telah didapat. Sumber-sumber primer seperti yang telah disebutkan diatas telah diteliti dan isinya sesuai dengan pembahasan.

Selanjutnya peneliti melakukan proses interpretasi (penafsiran sumber). Interpretasi sering disebut analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun, keduanya antara analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 1995: 103-104). Data dan fakta yang lepas satu sama lain dirangkaikan dan dihubungkan sehingga diperoleh satu kesatuan yang selaras, peristiwa yang satu dimasukkan ke dalam keseluruhan konteks peristiwa atau kejadian yang lain yang melingkupinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang yang diperoleh, peneliti dapat menyusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulis menyusun fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan peristiwa partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015. Setelah fakta-fakta yang ada disimpulkan berdasarkan data, selanjutnya fakta tersebut disusun dan ditafsirkan, sehingga fakta-fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan menjadi sebuah rangkaian informasi yang logis dan membentuk suatu rekonstruksi yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan penelitian.

Peneliti menginterpretasi fakta dengan kejelasan yang objektif. Untuk itu peneliti menghindari penafsiran yang semena-mena karena cenderung bersifat subjektif. Selain itu, peneliti melakukan interpretasi bersifat deskriptif untuk mencari landasan interpretasi yang digunakan. Proses interpretasi ini juga bersifat selektif sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah. Peneliti menggunakan pendekatan dan teori dari ilmu pengetahuan lainnya. Peneliti

menggunakan pendekatan sosiologi politik dengan teori pilihan rasional Coleman. Peneliti juga menggunakan tipologi partisipasi politik versi Rush & Althoff 2003.

Tahapan terakhir dari keseluruhan prosedur penelitian sejarah dengan menggunakan metode historis adalah penulisan atau lebih dikenal dengan historiografi. Sjamsudin (2007: 156) menyatakan bahwa dalam historiografi seluruh daya pikiran harus dikerahkan, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan atau catatan-catatan, tetapi yang paling penting penggunaan pikiran kritis dan analisisnya, karena pada akhirnya peneliti harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian. Usman (dalam Abdurrahman, 2007: 67-68) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa syarat umum yang harus diperhatikan peneliti dalam pemaparan sejarah, adalah :

- 1) peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa secara baik, agar data dapat dipaparkan seperti apa adanya atau seperti yang dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasa yang khas.
- 2) terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena ia didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan lain, penulisan itu ditematkannya sesuai dengan perjalanan sejarah.
- 3) menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca.
- 4) keseluruhan pemaparan sejarah haruslah argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau itu didasarkan pada bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap dan detail fakta yang akurat.

Peneliti melakukan proses seleksi dan penyusunan fakta-fakta sejarah dengan baik. Peneliti memperhatikan masalah relevansi. Artinya dalam penyeleksian, fakta-fakta sejarah yang akan digunakan adalah fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian. Terdapat empat aspek yang menjadi ukuran bagi relevansi. Keempat

aspek itu adalah aspek biografis, aspek geografis, aspek kronologis, dan aspek fungsional. Misalnya, untuk peristiwa keterlibatan Tokoh Struktural NU Cabang Jember terhadap pasangan calon Gus Aab tahun 2005, aspek biografisnya menyangkut nama tokoh-tokoh atau kelompok orang atau tokoh NU yang terlibat di dalamnya. Aspek geografisnya, antara lain menyangkut nama pulau dan kota dimana peristiwa itu terjadi, yakni pulau Jawa, Jember Jawa Timur. Aspek kronologisnya menyangkut periode-periode waktu pada proses partisipasi politik untuk pemenangan Gus Aab. Aspek fungsional, antara lain menyangkut jabatan-jabatan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut.

Setelah fakta-fakta sejarah diseleksi, fakta-fakta tersebut disusun. Penyusunan fakta sejarah yang paling masuk akal adalah penyusunan dilakukan secara kronologis dalam periode-periode waktu. Selain itu, penyusunan fakta sejarah dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sudut pandang geografis tempat sejarah terjadi dan berdasarkan tokoh pelaku. Baik orang maupun kelompok orang. Untuk menghindari pengulangan kisah peristiwa-peristiwa yang sama, cara penyusunan yang terakhir tetap diikuti dengan penyusunan kronologis.

Hasil penelitian sejarah ini ditulis dalam suatu bentuk tulisan yang terdiri atas enam bab, antara lain:

BAB 1. Pendahuluan

Dikemukakan latar belakang masalah, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat.

BAB 2. Tinjauan pustaka

Disajikan hasil *review* hasil penelitian relevan yang direkonstruksi oleh peneliti terdahulu. Kemudian juga dipaparkan posisi peneliti pada penelitian ini. Selanjutnya, juga dipaparkan tentang pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3. Metode penelitian

Dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi.

Diawali dengan pemaparan pengalaman politik NU Cabang Jember, adanya keinginan NU Cabang Jember untuk kembali berpolitik, serta kondisi geografis Jember dan tradisi Pesantren.

BAB 5. Bentuk Partisipasi politik NU Cabang Jember tahun 1998-2015

Diawali dengan pemaparan tentang NU dan tuntutan politik pada masa reformasi, kemudian bentuk Partisipasi politik NU Cabang Jember tahun 1998-2015 baik dalam Pemilihan Legislatif maupun Eksekutif.

BAB 6. Dampak sosial politik adanya partisipasi politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember.

Dipaparkan konflik kepolitikan elit NU menjelang Pilkada, yang terdiri dari sub bab kekecewaan NU terhadap PKB, munculnya politik kyai, DPC PKB resmi dan DPC PKB tandingan, serta perebutan pengaruh sesama tokoh NU.

BAB 7. Penutup

Berisi simpulan atau generalisasi dari uraian yang disajikan pada bagian sebelumnya. Bab ini juga dikemukakan saran.

BAB 4.FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI PARTISIPASI POLITIK NAHDLATULULAMA CABANG JEMBER PADA MASA REFORMASI

4.1 Pengalaman Politik NU Cabang Jember

Penyebab kembalinya NU dalam mengurus politik setelah menyatakan menarik diri dari percaturan politik disebabkan karena adanya pengamalan politik pada masa lampau. Pembentukan wadah politik bagi NU, tidak hanya sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga berperan sebagai pengatur konflik. Sejak sebelum dan pasca Indonesia merdeka, kiprah NU dalam politik berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan sosial politik nasional (Soon, 2008:221). Pengalaman politik NU secara periodik dijelaskan sebagai berikut.

4.1.1 Kiprah Politik NU Tahun 1930-1966

Sebelum organisasi NU Cabang Jember berdiri, di daerah Jember telah berkembang komunitas muslim yang mengikuti paham keagamaan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang dipelopori oleh KH. Mohammad Shiddiq. Sehingga dapat dikatakan bahwa, NU Cabang Jember hakekatnya merupakan wahana pelembagaan formal dari tradisi Sunni itu yang sudah ada sebelumnya (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Peneliti masih menemukan beberapa kesulitan untuk melacak secara pasti proses perintisan NU Cabang Jember. Sebab, tidak ditemukan bukti tertulis otentik yang merekam hal tersebut secara sistemik. Para tokoh ulama yang menjadi pelaku sejarah dalam perintisan NU Cabang Jember sudah tidak bisa diketemukan lagi, baik generasi pertama KH. Muhammad Shiddiq, generasi kedua atau yang bisa disebut generasi sahabat, yakni tokoh yang menyertai dan mengikuti *life history* generasi pertama tidak dijumpai lagi. Peneliti hanya menjumpai generasi ketiga atau tokoh yang mengikuti perjalanan generasi kedua, generasi keempat dan seterusnya yang

sudah mengalami keterputusan mata rantai historisitas dengan perintis NU Jember pertama.

Ada dua sudut pandang terkait proses berdirinya NU Cabang Jember. NU Cabang Jember secara formal organisatoris berdiri pada tahun 1928, tepat dua tahun setelah pendirian NU tingkat nasional di Surabaya tahun 1926. Dapat dipastikan, berdirinya NU tingkat nasional melibatkan kyai dari Jawa Timur, termasuk kyai dari Jember. Sebab, Jember pada tahun 1926 sudah ada KH. Mohammad Shidiq yang diperhitungkan di Jawa, dan dianggap sebagai penyebar dan pengembang Islam pertama di Jember. Pendapat lain mengatakan bahwa, NU Jember secara formal organisatoris baru berdiri pada tahun 1932. Pendapat tersebut diperkuat dengan bukti diselenggarakannya muktamar NU ke sembilan pada tahun 1934 di Banyuwangi yang menetapkan KH. Mahfudz Shiddiq dari Jember sebagai Ketua PBNU. Pelaksanaan muktamar dalam skala nasional dipastikan melibatkan cabang-cabang NU yang ada di berbagai wilayah, termasuk NU Cabang Jember (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

NU Cabang Jember pada era 1930-1940-an tidak terlepas dari perjuangan KH. Mahfudz Shiddiq dan kawan-kawan. Meski terpilih menjadi salah satu Ketua Tanfidziyah PBNU, KH. Mahfudz Shiddiq tetap mempunyai perhatian tersendiri terhadap perkembangan NU Cabang Jember. Pada periode tersebut, aktivitas keorganisasian NU Cabang Jember dicurahkan kepada perjuangan membela tanah air dari penindasan kaum kolonial dan persiapan meraih kemerdekaan (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Setelah KH. Mahfud Shidiq wafat, NU Jember 1950-an, banyak diwarnai oleh kiprah adik kandung KH. Mahfud Shiddiq yang bernama KH. Ahmad Shiddiq. KH. Ahmad Shiddiq tampil sebagai aktivis NU Cabang Jember yang progresif dan terkenal cemerlang serta banyak berjasa bagi perkembangan NU Cabang Jember, terutama NU skala nasional. (Noeh dan Mastuki, 1999: 41). Perkembangan NU Pusat juga dirasakan oleh NU di tingkat wilayah dan daerah, termasuk NU Jember. NU di semua tingkatan diubah menjadi sebuah partai politik, yakni Partai Nahdlatul Ulama

(PNU) pada tanggal 3 Juli 1952. Tanggal 28 April hingga 1 Mei 1952 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Mukhtamar ke 19 di Palembang untuk membahas asas dan tujuan Partai Nahdlatul Ulama yang terdiri dari: menegakkan Syari'at Islam, dengan berhaluan salah satu dari pada empat mazdhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Mukhtamar NU ke 19 juga memutuskan beberapa hal penting, antara lain: mendesak pemerintah RI agar segera mengadakan Pemilihan Umum, menyetujui pemerintah untuk menghemat anggaran, dan mendesak pemerintah agar menggiatkan pendidikan Pancasila (Soon, 2008: 109).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan mukhtamar ke 19, Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Mukhtamar ke 20 tanggal 9-14 September 1954 di Surabaya. Mukhtamar tersebut membahas persoalan politik mengenai strategi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah partai politik dalam memainkan perannya dalam Pemilihan Umum. Pada Pemilu tahun 1955, Nahdlatul Ulama berhasil memperoleh 8 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara meningkat menjadi 45 kursi dengan 18,4% suara, suara terbanyak yang diperoleh Nahdlatul Ulama dari Jawa. Kemenangan Nahdlatul Ulama diparlemen memberikan peluang bagi NU untuk terlibat dalam membuat kebijakan negara, sehingga peran politik NU mulai menonjol. Sebagai bentuk kegiatan rutin organisasi, pada bulan Desember 1956 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan mukhtamar ke 21 di Medan pada tahun 1956. Dalam mukhtamar ke 21 tidak dilakukan pembahasan masalah, karena para tokoh Nahdlatul Ulama terkonsentrasi pada politik kenegaraan. NU yang memperoleh jumlah kursi yang signifikan pada Pemilu 1955, dianggap sebagai sebuah prestasi yang harus dipertahankan (Fedeli, 2007:19).

Perjuangan NU dalam bidang politik dihadapkan pada persoalan adanya musibah tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah, sehingga muncul pergolakan yang mengatas namakan Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Simbolon di Sumatera Utara, munculnya Piagam Perjuangan Semesta (PERMESTA) yang dipimpin Kolonel V Samual di Makassar, serta menyusul pernyataan munculnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah yang didahului mundurnya Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Jabatannya. Tanggal 14 Maret

1957 terjadi perubahan besar, kabinet Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri setelah mengumumkan Keadaan Bahaya. Meski keadaan cukup genting, NU masih stabil memainkan peran politiknya, dengan melakukan bargaining dengan partai nasionalis. Presiden Soekarno berhasil membentuk kabinet baru dibawah Ir. Djuanda Kartawidjaja. Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan NU pada bulan April 1957 (Soon, 2008:115).

Situasi politik Indonesia yang masih tegang, muncul situasi baru dengan adanya keputusan Angkatan Perang yang disodorkan kepada Presiden Soekarno. Keputusan tersebut berisi usulan agar Indonesia kembali ke UUD 1945. Usulan tersebut diterima oleh Presiden, dengan mengeluarkan keputusan yang disebut Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini memutuskan antara lain:

- 1) pembubaran Konstituante,
- 2) kembali ke UUD 1945, dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950,
- 3) membentuk Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.

Lahirnya Dekrit Presiden diterima oleh NU. Tetapi Masyumi yang tidak sejalan dengan pemerintah menolak Dekrit tersebut, bahkan Masyumi bersama Partai Sosialis Indonesia terlibat dalam pemberontakan PRRI. Akibatnya Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 (Alfian, 1986: 37-38).

Setelah Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno, NU mendapat peluang besar untuk tetap berkiprah di dalam pemerintahan, ditambah NU lebih kompromis terhadap Presiden dalam berbagai hal. Terlepas ini bagian dari strategi politik NU untuk tetap mengambil bagian dalam pemerintahan Soekarno, NU tetap berada dalam kekuasaan dan menjadi pendukung pemerintah bersama PNI. Tetapi, partai pendukung pemerintah baik NU maupun PNI sering dikejutkan dengan lahirnya kebijakan Soekarno yang cenderung inkonstitusional. Menurut Alfian (1986: 250), tindakan Presiden Soekarno yang inkonstitusional antara lain:

- 1) pembubaran Kabinet, kemudia menunjuk dirinya sebagai formatur pembentukan kabinet baru yang dikenal Kabinet Kerja,
- 2) Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tertanggal 22 Juli. MPR hasil Pemilihan Umum dibubarkan dan diganti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,
- 3) Penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960, DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan dan diganti Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Kemudian pada bulan Februari 1960, diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia. Presiden menyampaikan pidato yang disebut USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

NU juga dibenturkan dengan lahirnya NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunis). Meskipun Keputusan Presiden tersebut dianggap inkonstitusional oleh NU, namun NU mengambil langkah rasional dengan tetap mendukung Soekarno tanpa kritik untuk mendapatkan respon baik Presiden. Kondisi tersebut menjadi kondisi kritis bagi NU, sebab NU harus mendukung NASAKOM yang dibangun oleh pergulatan politik di level elit kekuasaan, di sisi lain NU justru mengembangkan perlawanan total terhadap Komunisme. Melalui HM. Subchan selaku Ketua IV PBNU, NU tampil sebagai pelopor dalam pembentukan Komando Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh (KAP Gestapu), yang kemudian menjadi Front Pancasila. KAP Gestapu menggalang kekuatan dari PMII, HMI, Anshor serta beberapa organisasi lainnya dan Muhammadiyah. (Soon, 2008:119-124).

4.1.2 Kiprah Politik NU pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1998

Tanggal 25 Juli 1966, kabinet Ampera terbentuk, NU mendapat jatah posisi Menteri Agama yang dijabat oleh KH. Moh Dahlan, dan Mentri Kesejahteraan Rakyat dijabat KH. Idam Chalid selaku Ketua PBNU. Tanggal 10 Januari 1967, melalui sebuah pidato Soekarno menyangkal bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa 1965. Namun penjelasan tersebut ditolak oleh para mahasiswa maupun kalangan NU.

Yusuf Hasim Wakil Ketua I Ansor, menuntut agar peran Soekarno dalam kudeta diperiksa dan keadilan diterapkan seperti kepada rakyat lainnya (Soon, 2008:125).

Pada tanggal 27 Januari 1967, melalui Dekrit Presiden, anggota DPR-GR yang berjumlah 242 anggota ditambah 108 anggota, sehingga berjumlah 350 orang. Awal Februari 1967, Nurdin Lubis selaku Juru Bicara kelompok NU di DPR-GR, mengusulkan adanya sebuah memorandum yang berisi 10 halaman. Isi memorandum itu menolak laporan Soekarno mengenai perannya dalam Gerakan 30 September 1965. Nurdin Lubis meminta agar dilangsungkan suatu sidang istimewa MPRS untuk mencopot Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden, pengadilan menyelidiki peran Soekarno dalam peristiwa G 30 S, dan dipilihnya seorang presiden baru. Meski demikian, NU masih belum mempunyai calon Presiden baru untuk diajukan, sementara ABRI mencalonkan Soeharto. Berdasarkan pertimbangan, Soeharto juga berperan dalam memberantas PKI. Tanggal 23 Februari 1967 resolusi kedua yang dikeluarkan oleh Djamaluddin Malik anggota DPR-GR dari Nahdlatul Ulama, disahkan. Resolusi ini meminta agar MPRS mengangkat Jendral Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 8 hingga 11 Maret 1967 MPRS resmi mencopot kekuasaan Soekarno dalam pemerintahan serta melarangnya melakukan kegiatan politik hingga Pemilihan Umum mendatang (Anam, 1986: 301).

Kondisi politik yang semakin kacau sejak munculnya Gestapu, berujung pada pemberhentian Soekarno sebagai Presiden dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII 1967. Ketetapan MPRS tersebut Soeharto diberi tugas sebagai Pejabat Presiden untuk mengusut adanya keterlibatan Soekarno dalam Gestapu. Setelah Soekarno secara resmi diberhentikan sebagai Presiden dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967, NU memainkan peran politik, terutama berkaitan dengan persiapan Pemilu pada tahun 1968. Namun setelah terdengar informasi pemerintah berencana untuk menunda Pemilu hingga tahun 1973, HM. Subchan selaku Ketua IV PBNU berhasil menolak rencana tersebut, dan diputuskan ditunda sampai tahun 1971. NU pada Pemilu 1971 tersebut, sukses meraih 58 kursi di DPR. Dengan perolehan kursi yang cukup banyak, HM. Subchan menghendaki agar NU lebih bersifat progresif

dalam mengurus politik pemerintahan, namun pemikiran Subchan tidak sejalan dengan pemikiran Idam Chalid selaku Ketua PBNU yang menghendaki NU harus menunjukkan politik yang kooperatif. Bahkan pemikiran HM. Subchan dianggap kebarat-baratan oleh Idam Chalid (Soon, 2008:126).

Sumbangsih NU dalam mengangkat karier politik Soeharto terlihat melalui Resuffel DPR-GR dan dua resolusi yang mengabsahkan peralihan kekuasaan ke tangan Soeharto. Sampai tahun 1971, system politik masih menggunakan warisan Orde Lama. Atas dasar itu Subhanmelancarkan kritik terhadap pemerintah. Hal lain yang menyebabkan terjadinya banyak pertikaian terutama soal pelaksanaan Pemilihan Umum yang sejak tahun 1955 belum pernah diadakan lagi. ABRI karena belum memiliki partai politik berusaha mengulur waktu untuk penyelenggaraan Pemilu. Tahun 1967 Ansor meminta agar Pemilihan Umum diselenggarakan paling lambat tahun 1967, namun MPRS memutuskan Pemilu diselenggarakan paling lambat tanggal 5 Juli 1968 (soon, 2008:125).

Fraksi Angkatan Bersenjata atau ABRI di dalam sidang DPR-GR menghendaki pengaktifan kembali Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1965 yang melarang para pejabat tinggi menjadi anggota partai politik. Keinginan tersebut menimbulkan reaksi yang keras dari NU. Sebagai pemegang Departemen Agama, NU dengan diterapkannya Penetapan Presiden tersebut juga akan terkena dampaknya. Para politisi NU yang menjadi pegawai negeri, seperti Subchan dan Mohammad Dachlan menuntut pembatalan Penetapan Presiden tersebut. Golongan liberal Nahdlatul Ulama memprotes usaha untuk memberikan 50% kursi di DPRD, DPR dan MPR kepada Golkar dan Angkatan Bersenjata. Kritik-kritik mulai dilontarkan kepada Pemerintah Orde Baru, terutama dibidang kebijakan ekonomi yang mematikan pengusaha kecil. Dalam waktu dua tahun sesudah ABRI berhasil menggantikan rezim Orde Lama, telah muncul banyak sumber ketidakcocokan. NU secara bertahap menjadi kelompok Oposisi. Perbedaan prinsip kalangan Nahdlatul Ulama dengan ABRI dari hal-hal tersebut diatas telah menjadikan kedua kelompok kekuatan tersebut berhadapan (Soon, 2008:127).

Pemilu tahun 1971 memberi cukup waktu pada ABRI (Golkar) untuk berbenah diri. Peraturan politik yang melarang pegawai negeri untuk bergabung dengan suatu Partai disatu pihak, sementara dipihak lain pegawai negeri harus monoloyalitas, artinya pegawai negeri harus memilih Golkar telah merugikan kalangan NU. Golkar berusaha melakukan kecurangan melalui intimidasi terhadap warga Nahdlatul Ulama yang ketakutan karena agar memilih Golkar. Golkar mengasihkan 231 kursi di DPR (68,8%) melawan Nahdlatul Ulama dengan 58 Kursi (18,7%), PNI dan Parmusi, mendapatkan masing-masing 6,9% dan 5,4%. Kemenangan Golkar berkat kegigihan dan kerja keras Babinsa yang menakut-nakuti masyarakat desa. Akibat persaingan dengan Golkar yang semakin terbuka, NU kehilangan Departemen Agama. Selanjutnya yang diangkat menjadi Menteri Agama adalah Mukti Ali seorang Anggota Kopri (Anam, 1986:308).

Rezim Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang penggabungan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, partai politik digabung menjadi dua partai. NU, Parmusi, PSII dan Perti difusikan ke dalam PPP, sedangkan PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba difusikan ke dalam PDI, ditambah satu Golongan yaitu Golkar. Ketua umum DPP PPP diberikan kepada Mintarejadari Parmusi. Sedangkan Nahdlatul Ulama, menduduki Sekretaris Jendral yang dijabat oleh Jahja Ubaid. Tiga badan lain dalam DPP PPP diserahkan pada NU, yaitu, Presiden dijabat KH. Idam Chalid, Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Majelis Syura dijabat oleh KH. Mohammad Dahlan (Soon, 2008:129).

Fusi partai politik dalam PPP pada perkembangannya terjadi sebuah konsensus pada tahun 1975 yang berisi bahwa distribusi kekuasaan antar unsur partai yang fusi ke dalam PPP diatur seperti perimbangan hasil Pemilu 1971. Setelah PPP berhasil menambah perolehan suara 5 kursi pada Pemilu tahun 1971, konsensus yang disepakati dihinai, sehingga Nahdlatul Ulama kehilangan 2 kursi. KH. Idam Chalid mulai menyadari bahwa terbentuknya satu partai Islam ternyata merupakan perangkat bagi NU. Setiap mendekati Pemilu konflik internal di kalangan partai tidak dapat dihindari. Hal ini merupakan iklim yang sengaja diciptakan untuk mengembosi

NU, bahkan ada upaya melemahkan kekuatan NU yang dilakukan rezim Orde Baru dengan membentuk Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, sebagai tandingan NU (Soon, 2008:133).

Pimpinan PPP tahun 1978 dipegang tokoh Islam modernis yang bernama John Naro. Tampilnya John Naro sebagai Pimpinan PPP menyebabkan posisi NU dalam PPP semakin terpinggirkan. Tanggal 27 Oktober 1981, Naro menyerahkan daftar Caleg PPP kepada Pemerintah. Dalam daftar tersebut 29 caleg dari Nahdlatul Ulama ditempatkan pada urutan terbawah sehingga kemungkinan untuk terpilih tidak ada. Akibat konflik yang terjadi dalam PPP semakin melebar, menyebabkan 29 orang tokoh Nahdlatul Ulama gagal dari nominasi calon terpilih mewakili PPP. KH. Ali Ma'sum selaku Ra'is Aam PBNU, K.H Idam Chalid selaku Ketua PBNU, dan H.M Munasir selaku Sekjen PBNU berusaha menolak daftar yang diajukan John Naro, dengan berkirim surat pernyataan protes yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Umum dan ke DPP PPP, tetapi tidak ditanggapi, bahkan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum menganggap bahwa daftar calon yang diajukan John Naro sah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 440/15/XI/81 (Fathoni, 1992:66).

Hasil Pemilu tahun 1982, Nahdlatul Ulama kehilangan 5 kursi, dibanding hasil pemilu tahun 1977, hal ini disebabkan PPP yang telah disetir Golkar, juga kecurangan-kecurangan lain yang telah dilakukan Golkar di desa-desa. Tekanan Golkar dari luar yang semakin kuat ditambah tekanan dari dalam PPP sudah terkontaminasi dan tidak pernah konsisten dengan janjinya terutama dalam hal pembagian jatah kursi, membuat NU semakin pesimis dengan politik (Haidar, 1994:205).

Setelah Pemilu 1982, konflik NU di dalam PPP tidak juga mereda. Kondisi ini mengarah pada penilaian terhadap KH. Idam Chalid yang sudah dianggap tidak mampu menjalankan amanah sebagai Ketua Umum PBNU. Penilaian terhadap kepemimpinan KH. Idam Chalid dalam PBNU menimbulkan konflik internal dalam tubuh NU. Di tengah polemik kemunduran Nahdlatul Ulama dari politik, para ulama

memutuskan untuk memecat Idham Chalid. Kemudian para ulama pergi ke Jakarta untuk bertemu Idham Chalid dan menyuruh mundur. Tanggal 6 Mei 1982 Idham Chalid menandatangani surat pengunduran diri. Namun pada tanggal 14 Mei tahun 1982, KH. Idham Chalid mencabut kembali surat pemunduran dirinya. Akibatnya NU pecah menjadi dua kubu, yakni: kubu KH. Idham Chalid yang dikenal dengan kubu Cipete, dan kubu Situbondo yang dipimpin KH. As'ad Syamsul Arifin asal Situbondo dan KH. Ahmad Shiddiq asal Jember (Soon, 2008:137).

4.2 Perbedaan Penafsiran Terhadap *Khittah* 1926

Konflik internal antara NU, serta konflik antara NU dengan Madrasah Ibtid'iyah dalam PPP tidak kunjung terselesaikan. Ditambah, Presiden Soeharto pada bulan Agustus 1983 kembali kerencana semula. Semua organisasi keagamaan diminta menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Nahdlatul Ulama menentang keras rencana tersebut, karena khawatir Pancasila akan menggantikan agama Islam. Pada bulan September 1983 Kyai As'ad menghadap Presiden untuk meminta izin mengadakan musyawarah Nasional Para Ulama. Munas alim ulama NU dilaksanakan pada tanggal 18-21 Desember tahun 1983 di Situbondo. Tujuan dilaksanakannya Munas alim ulama di Situbondo, antara lain:

- 1) mengembalikan aktivitas NU dari bidang politik ke asalnya, yakni bidang dakwah, pendidikan, dan sosial,
- 2) menyerahkan sepenuhnya kepada warga NU dalam menyalurkan aspirasi politiknya, baik kepada PPP, Golkar, maupun PDI,
- 3) membenahi organisasi setelah terperangkap dalam konflik internal.

Munas Alim Ulama tersebut menghasilkan keputusan bahwa NU menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal (Basri, *et al*, 1994: 84-86). Hasil Munas ditegaskan dalam Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo pada tanggal 8-12 Desember tahun 1984. Keputusan menerima asas Pancasila sebagai ideologi tunggal, dan keputusan kembali ke *khittah* dilakukan NU untuk mengintensifkan perhatiannya terhadap kepentingan sosial keagamaan, dan melepaskan keterkaitan dengan politik (Soon, 2008: 251).

Adanya keputusan *khittah* NU menimbulkan banyak penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan sesuka hati, ada yang menganggap bahwa Khittah NU merupakan penarikan diri dan meninggalkan segala macam politik. Adapula yang menafsirkan bahwa adanya *khittah* adalah langkah melepaskan diri dari PPP dan berganti memberikan dukungan partai dengan alasan kekecewaan terhadap PPP. Pengertian Khittah yang sebenarnya disebutkan dalam keputusan Mukhtamar XXVII NU No.:02/MNU-27/1984, yang isinya:

- 1) *khittah* Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan,
- 2) landasan tersebut adalah faham Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang diterapkan menurut kondisi masyarakat di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan,
- 3) *khittah* Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa (Muzadi, 2006: 25).

Ketika NU dalam upaya pemantapan Khittah NU dan mengatasi permasalahan yang timbul setelah adanya *khittah* NU, muncul pula gagasan agar NU kembali berpolitik praktis, gagasan tersebut dikemukakan oleh H. Mahbub Djunaedi yang lebih dikenal dengan istilah *khittah plus*. Isu ini muncul menjelang dilaksanakannya Munas Alim Ulama di pondok pesantren Ihya' Ulummudin Kesugihan, Cilacap, 15-18 November 1987. Ide yang dilontarkan Mahbub merupakan ketidaksetujuan terhadap hasil Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo tentang kembali ke Khittah dan meninggalkan segala macam politik praktis. Pada prinsipnya H. Mahbub Djunaedi menginginkan adanya koreksi terhadap hasil-hasil Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984, yang memutuskan kembalinya NU ke Khittah 1926, berarti melepaskan diri dari urusan politik praktis dan hanya mengkhususkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan (Fathoni dan Zen, 1992:139).

Khittah Plus merupakan pemikiran yang kontroversial dikalangan NU. Pemikiran dari Mahbub Djunaedi ini berusaha ditentang oleh beberapa ulama

seperti KH. Ahmad Shiddiq dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena akan mempengaruhi proses kembalinya NU ke Khittah NU 1926. *Khittah Plus* muncul sebagai pewarna dari perjalanan panjang NU dalam urusan politik. Karena kurunwaktu yang panjang pula objektifitas pemikiran tentang *Khittah Plus* malah sering digunakan dalam urusan politik warga NU. Mahbub Djunaedi sadar bahwa mengembalikan NU menjadi partai politik memang sulit, apalagi dengan adanya benturan dengan para Kyai. Tetapi, Mahbub yakin sesuatu yang sulit belum tentu Mustahil untuk terjadi dengan melihat perkembangan sistem politik di Indonesia (Marijan, 1992:180).

Lahirnya keputusan kembali ke *Khittah*, ditentang oleh Mahbub Djunaedi. Ada 2 alasan yang dikemukakan Mahbub Djunaedi, antara lain:

1) politik adalah jalan yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan.

Definisi politik secara singkat menurut Budiardjo (2008: 13) adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik, sehingga NU tidak bisa dipisahkan dengan urusan politik, karena sejak tahun 1952 NU menjadi sebuah partai politik. Budaya politik sudah mengakar kuat dalam tubuh NU dan para tokoh-tokohnya. Meski sudah ada rambu-rambu larangan untuk merangkap jabatan tetapi masih kalah dengan keinginan para tokoh NU untuk tetap berpolitik. Banyak tokoh-tokoh NU yang dalam struktural masuk dalam pengurusan NU juga masih masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik, utamanya di PPP. Seperti H. Imron Rosyadi, H. Imam Afwan, Kyai Syamsuri Badawi dan beberapa tokoh NU (Marijan, 1992:160).

2) NU hanya dijadikan penyumbang suara bagi partai politik.

Untuk tetap menjaga kenetralan politik yang dipegang oleh NU pasca Khittah 1926 dilakukanlah aksi pengembosan terhadap PPP, di wilayah yang basis NU-nya sangat besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang dilakukan oleh H. Mahbub Djunaedi, H. M. Yusuf Hasyim, H. Syafii Sulaiman, KH. Sohib Bisri, H. Hasyim Latief, KH. Imron Hamzah dan beberapa nama kyai lainnya. Aksi pengembosan terhadap PPP justru mengutungkan partai Golkar dan PDI. Selama kebebasan memilih warga NU masih disetir oleh para tokoh yang masih terlibat

dalam dunia politik. NU yang memiliki basis masa terbesar di Indonesia dalam setiap Pemilu hanya dijadikan alat untuk mendulang suara. NU hanyadijadikan tarik-ulur oleh partai-partai politik guna mendapatkan masa dan dukungan oleh NU engan berbagai iming-iming jabatan dan kesejahteraan. Mahbub menjelaskan, ia tidak bisa membayangkan warga NU yang sekitar 20 jutaan pada tiap pemilu hanya berdiri di luar pagar dan cukup terbatas pada tukang beri suara. Mahbub merasa yakin masih banyak warga NU yang menginginkan ormas keagamaan ini menjadi parpol lagi jika keadaan memungkinkan(Marijan, 1992:162).

Kebebasan memilih warga NU masih disetir oleh para tokoh yang masih terlibat dalam dunia politik. NU yang memiliki basis masa terbesar di Indonesia dalam setiap pemilu hanya dijadikan alat untuk mendulang suara. NU hanyadijadikan tarik-ulur oleh partai-partai politik guna mendapatkan masa dan dukungan oleh NU engan berbagai iming-iming jabatan dan kesejahteraan. Mahbub menjelaskan, ia tidak bisa membayangkan warga NU yang sekitar 20 jutaan pada tiap pemilu hanya berdiri di luar pagar dan cukup terbatas pada tukang beri suara. Mahbub merasa yakin masih banyak warga NU yang menginginkan NU menjadi parpol lagi jika keadaan memungkinkan.

Berdasarkan asumsi di atas, Mahbub Djunaidi menentang hasil keputusan *khittah*. Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Penggunaan hak berpolitik harus dilakukan menurut peraturan perundangan, sehingga tercipta budaya politik yang sehat. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama harus menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik dan bersungguh-sungguh. Serta memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik yang manapun dan menyalurkan aspirasi politik melalui organisasi politik pilihannya itu, selama dipandang bermanfaat dan tidak merugikan Islam dan perjuangan umat Islam (Anam, 2010: 68-69).

Munculnya *khittah plus* menjadi bahasan utama dalam Konferensi Besar NU di Cilacap tahun 1987. Khittah Plus sendiri sebenarnya mendapatkan banyak dukungan

dari para politisi dan tokoh muda NU yang menginginkan sebuah kejayaan sewaktu menjadi partai politik dan keinginan untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain pembahasan tentang *Khittah Plus* NU juga membahas strategi untuk menggulingkan kepemimpinan Abdurrahman Wahid dengan digantikan Yusuf Hasyim. Upaya untuk menggulingkan Abdurrahman Wahid dalam Konbes Cilacap tidak berhasil karena memang tidak dibenarkan dalam AD/ART. Ditambah ada jaminan dukungan dari Rois Aam PBNU KH. Ahmad Shiddiq, bahwa Abdurrahman Wahid masih bisa dan mampu untuk terus memimpin NU. Akhirnya dalam konbes itu juga ditegaskan, PBNU menganggap selesai persoalan perbedaan pandangan yang ada. Selanjutnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PBNU akan selalu berpedoman kepada keputusan-keputusan formal organisasi sebagaimana dihasilkan Muktamar NU 1984 (Marijan, 1992:157).

Sebagai dampak keputusan yang diambil PBNU, NU dikembalikan ke jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan dengan menempatkan peran sentral para kyai. Kondisi tersebut berdampak kepada organisasi-organisasi NU yang ada di tingkat daerah. Tokoh-tokoh NU Jember saat itu seperti K.H. Muhid Muzadi, H. Muchson Sujono yang sempat menjadi anggota DPRD Jember beberapa kali pada pemilu 1955 dan 1971, kembali menggeluti aktivitas di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Pada masa ini penguatan NU secara kultural gencar dilakukan (hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Adapun penguatan secara struktural keorganisasian NU Jember pasca Muktamar NU ke 27 mulai tampak. NU Cabang Jember tidak lagi berorientasi semata-mata kepada pembinaan *jamâ'ah* NU Jember melalui kegiatan dakwah, pendidikan pesantren, perekonomian, dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan NU Jember diorientasikan pula kepada aspek pembinaan dan pembenahan struktural institusi NU itu sendiri yang terkesan kalah wibawa bila dibandingkan dengan peran personalitas kyai dan pesantren. Beberapa program kerja seperti Pelatihan, Manajemen Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Pengurus, Pengelolaan

Tertib Administrasi, Kepemimpinan organisasi Pengurus NU, mulai diprioritaskan secara serius (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Dalam perkembangannya, NU Cabang Jember tidak lagi dimonopoli tokoh-tokoh dari kalangan pesantren salaf. Program-program kegiatan NU Cabang Jember, baik yang terkait dengan aspek struktural keorganisasian NU Cabang Jember maupun kultural warga masyarakatnya, mulai tersusun secara sistematis dengan memiliki sasaran dan target yang jelas. Agenda kegiatan NU Jember selalu diselaraskan dengan kondisi perkembangan sosial dan politik masyarakat yang terus berubah. Pola kerjasama antara instansi atau organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah dan pelaksanaan program kerja yang profesional mulai ditempuh. Beberapa agenda kegiatan NU Jember yang terencana pada dekade terakhir dapat ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban kepengurusan 1993-1997 yang antara lain menitikberatkan kebijakan program kegiatan NU pada:

- 1) peningkatan amal dan prestasi NU baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai upaya mencapai kemaslahatan umat;
- 2) meningkatkan sumberdaya manusia NU dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) meningkatkan kelembagaan NU secara organisatoris di samping kekuatan NU secara kultural;
- 4) mempererat jaringan komunikasi baik individu maupun kelompok untuk memecahkan masalah-masalah bersama yang dilandasi *Ukhuwah Nahdliyyah*, *Ukhuwah Islâmiyyah*, dan, *Ukhuwah Basyariyyah*;
- 5) meningkatkan kesadaran dalam mengamalkan Khittah NU 1926.

Kelima kebijaksanaan program kerja NU tersebut dituangkan ke dalam lima departemen program kerja yang meliputi:

- a) pengembangan sumberdaya manusia NU;
- b) program perekonomian dan kesejahteraan;
- c) sosial;
- d) dakwah; dan

e) keorganisasian (Laporan Hasil Konfercab NU Jember, 1999).

Terlepas dari program kerja yang disusun NU Cabang Jember, NU sebagai organisasi kemasyarakatan dituntun menjadi penghubung rakyat dengan pemerintah. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, NU harus membangun simbiosis mutualisme dengan partai politik yang lebih memiliki akses ke pemerintah. Artinya, NU membutuhkan partai politik, partai politik juga membutuhkan NU.

Kenyataan yang dihadapi NU dalam hubungannya dengan partai politik semenjak Orde Baru cenderung diabaikan. Sehingga kepentingan untuk memperjuangkan rakyat kerap kali tidak tercapai. Potensi warga NU yang menjadi mayoritas di Indonesia, menjadi kekuatan tersendiri untuk membentuk partai politik sendiri yang mampu berjuang atas nama NU.

Konfigurasi gagasan organisasi, untuk mengembangkan NU sendiri, reformasi digunakan sebagai katalisator dalam memasuki panggung politik. Sistem reformasi menciptakan kelembagaan politik yang lebih produktif, dan NU memandang kekuatan organisasi akan muncul jika terjadi aliran kekuasaan. Berdasarkan pengalaman politik pada masa Orde Baru, NU dipaksa mengikuti permainan politik Orde Baru. NU belajar dari pengalaman untuk membangun gagasan kelembagaan politik yang independenn dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dirobohkan orang lain maupun pemerintah (Soon, 2008:237).

Berdasarkan pengalaman sejarah juga, kekuatan NU yang terdiri dari lapisan bawah, Pesantren, dan desa, tetapi di kota lebih banyak dijadikan objek kekuasaan. NU sengaja ditinggalkan oleh rezim Orde Baru. Bahkan di era pemerintahan BJ. Habibie, jika ditinjau dari segi *khittah*, NU secara struktural tidak boleh mengurus politik. Sehingga agar kekuatan NU tidak hanya dimanfaatkan oleh kepentingan partai politik yang tumbuh pada masa reformasi, NU mengambil langkah mendirikan partai politik, tetapi NU tetap sebagai organisasi sosial keagamaan.

4.3 Keinginan NU untuk Kembali Berpolitik

Reformasi politik 1998 memunculkan kebijakan liberalisasi politik yang ditandai dengan perubahan 5 Paket Undang-Undang Politik. Perubahan itu membuka kesempatan untuk memunculkan partai baru. Sejalan dengan hal itu, desakan agar NU bermain kembali dalam ranah politik mulai menguat kembali, terutama dari lapisan elite dan kalangan muda NU. Gejala itu semakin memperoleh dukungan luas seiring dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto.

Pasca diputuskan NU kembali ke *khittah* tahun 1984, muncul polarisasi dalam tubuh internal NU. Menurut Soon (2008: 135), NU terpolarisasi menjadi tiga kelompok, antara lain:

- 1) kelompok yang masih menghendaki politik. Kelompok ini terdiri dari: Idham Chalid Ketua Umum PBNU;
- 2) kelompok yang menyepakati NU kembali ke *khittah*, antara lain: K.H Abdul Hamid Pasuruan, KH. Ahmad Shiddiq Jember, dan KH. Ali Ma'sum Yogyakarta;
- 3) kelompok yang menghendaki NU kembali ke *khittah*, namun tidak meninggalkan politik, antara lain: HM. Muhammad Hasyim, Ketua I PBNU.

Mukatamar NU ke 28 yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 November tahun 1989 di Pondok Pesantren Al Munawwir Yogyakarta, menghasilkan keputusan yang lebih mengarah kepada pemikiran HM. Muhammad Hasyim. Ada sembilan pedoman politik bagi NU, antara lain:

- 1) berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) politik bagi NU adalah politik yang mengembangkan kemerdekaan hakiki dan demokratis;

- 4) politik bagi NU dilakukan dengan landasan moral, etika dan budaya yang berketuhanan yang maha esa;
- 5) politik bagi NU harus dilandasi kejujuran moral dan agama sesuai peraturan dan norma yang disepakati;
- 6) politik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional;
- 7) politik dilakukan dengan tidak mengorbankan kepentingan bersama;
- 8) mengedepankan persaudaraan di atas perbedaan pandangan politik;
- 9) politik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik (Soon, 2008: 145).

Sehari setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur, PBNU mendapat usulan untuk mendirikan partai politik. Usulannya beragam, ada yang hanya mengusulkan agar membentuk partai politik, adapula yang mengusulkan nama partai politik namun ada pula yang mengusulkan secara lengkap mulai dari konsep, nama dan lambang partai serta hubungan kelembagaan antara NU dengan partai baru tersebut. Dari 39 nama yang diusulkan, yang paling banyak muncul adalah Partai Nahdhatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan unsur-unsur yang banyak diusulkan untuk lambang partai adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada pula yang mengusulkan bentuk hubungan partai baru dengan NU, visi misi dan AD/ART partai baru serta sekaligus nama-nama calon pengurus. Usulan paling lengkap muncul dari Lajnah Sebelas Rembang dan PWNU Jawa Barat (Soon, 2008: 223).

PBNU cenderung bersikap hati-hati dalam menanggapi usulan tersebut. Alasan yang dikemukakan secara formal adalah kenyataan hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo telah menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap itu dapat dibaca sebagai bentuk *test case* untuk menguji seberapa besar kekuatan politik warga NU.

Momentum bagi NU untuk tetap mengurus politik semakin menemukan relevansinya saat terjadi reformasi pemerintahan tahun 1998. Presiden BJ Habibie

yang menggantikan Soeharto, dianggap kurang respek terhadap keberadaan NU dengan tidak melibatkan NU dalam proses penyusunan kabinet. Sejumlah tokoh NU yang melihat kenyataan tersebut, menghendaki NU agar membuat terobosan baru, sehingga PBNU mulai mendapat usulan untuk mendirikan partai politik. Usulannya beragam, ada yang hanya mengusulkan agar membentuk partai politik, adapula yang mengusulkan nama partai politik namun ada pula yang mengusulkan secara lengkap mulai dari konsep, nama dan lambang partai serta hubungan kelembagaan antara NU dengan partai baru tersebut (Soon, 2008: 225).

4.4 Kondisi Demografis dan Tradisi Pondok Pesantren Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan suatu daerah yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Secara astronomis, Jember berada pada posisi $6^{\circ} 27' 9''$ sampai $7^{\circ} 14' 33''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 59' 6''$ sampai $8^{\circ} 33' 56''$ Lintang Selatan. Jember sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, dan Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Banyuwangi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, dan sebelah selatan terdapat Samudera Hindia (BPS, 2000: 16).

Secara administratif, Jember dibagi menjadi delapan wilayah kerja Pembantu Bupati dan Satu kota administratif, 31 Kecamatan. Delepan Wilayah Kerja Pembantu Bupati di antaranya sebagai berikut:

- 1) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kota Administratif yang terdiri dari: Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari;
- 2) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Arjasa yang terdiri dari: Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Pakusari, dan Sukowono;
- 3) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kalisat meliputi: Kecamatan Kalisat, Ledokombo, dan Sumberjambe;
- 4) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Mayang, meliputi: Kecamatan Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Temporejo;
- 5) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Rambipuji meliputi: Kecamatan Rambipuji, Jenggawah, Panti, Sukorambi, dan Ajung;

- 6) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Tanggul meliputi: Kecamatan Tanggul, Sumberbaru, Semboro, dan Bangsalsari;
- 7) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kencong meliputi: Kecamatan Kencong, Gumukmas, Umbulsari, Puger, dan Jombang;
- 8) Wilayah Kerja Pembantu Bupati Balung meliputi: Kecamatan Balung.

Kabupaten Jember tahun 1998 memiliki 30 SMA maupun MA swasta, dan 16 SMA maupun MAN. Persentase lembaga pendidikan setingkat SMA yang didominasi lembaga swasta dijadikan basis tersendiri oleh NU Cabang Jember, sebab lembaga swasta tersebut lebih banyak dikelola oleh Pesantren. Jumlah pemilih di Kabupaten Jember pada tahun 1998 mencapai 1.348.770 orang. 549.352 yang menyalurkan hak pilih pada Pemilu tahun 1998, tersebar ke sejumlah partai politik (BPS, 2000: 63).

Hal senada juga dikemukakan oleh Haris dkk (2002:9), bahwa 80 persen dari total keseleruhan warga Jember adalah warga *nahdliyyin* yang tersebar ke sejumlah organisasi berkultur NU, seperti: Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lembaga Pendidikan Ma'arif (LPM), Pagar Nusa, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Lemabaga Pengembangan Pertanian (LP2NU), Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI). Adanya organisasi berkultur NU tersebut menjadi potensi besar jika digunakan untuk sebuah kepentingan yang berorientasi pada mobilisasi massa.

Kabupaten Jember merupakan suatu daerah yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya Jember Utara, Jember Tengah, dan Jember Selatan. Masyarakat etnis Jawa mendominasi wilayah selatan Jember seperti Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Kencong, Jombang, Umbulsari, dan Semboro (BPS, 2000: 16). Penduduk setempat mempraktekkan unsur-unsur budaya Jawa, baik dalam hal bahasa, kesenian, maupun adat-istiadat lainnya. Sedangkan untuk urusan pendidikan tetap berorientasi pada pendidikan formal, meskipun juga terdapat Pondok Pesantren.

Sementara masyarakat Jember Utara mayoritas merupakan etnis Madura. Secara kultur tetap bertahan pada orientasi budaya Madura dalam kesehariannya. Bahasa Madura merupakan bahasa sehari-hari masyarakat di Kecamatan Arjasa, Jelbug, Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, dan sebagian Pakusari (BPS, 2000: 16). Masyarakat Madura menjadikan pengajian sebagai acara favorit, karena di samping mendapatkan wejangan-wejangan tentang Islam, juga bisa bertemu dengan para Lorah (sebutan untuk kyai) ataupun Gus (anak kyai) yang dianggap bisa mendatangkan berkah bagi kehidupan warga (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus, 2016).

Wilayah tengahkota dan pinggiran kotaJember, di samping berdagang, etnisTionghoasebagai berkah reformasi politik nasionaljuga mulai mengembangkan kesenian Barongsai dan Liang liong sebagai kesenian khas. Kesenian ini dipertontonkan menyusuri jalan-jalan protokol kota Jember pada peringatan Imlek. Meskipun generasi mudanya sudah menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa dengan aksen Tionghoa, Bahasa Mandarinmulai diperkenalkan kembali. Uraian mengenai kultur kabupaten di Jember di atas memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial politik Jember. Masyarakat Jember yang sebagian besar merupakan etnis madura masih mempertahankan budaya “*Bapa’ Bapu’ Guru Rato*” (Huda,1997:38).Kultur Madura yang mewarnai masyarakat Jember secara geopolitik menempatkan kyai sebagai pusat pemersatu. Fungsi kyai sebagai tokoh agama dan tokoh politik dimaknai sebagai suatu keniscayaan yang masih diyakini dan ditaati oleh masyarakat setempat. Tokoh-tokoh penting yang memiliki peran dan pengaruh politik adalah kyai.

Selain KH. Ali Wafa, Ulama Madura yang cukup berpengaruh di Jember bagian utara, ada KH. Chotib Umar Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah di Sumberwringin Kecamatan Sukowono. Dua kyai besar tersebut dijadikan panotan oleh mayoritas masyarakat Jember utara, baik dalam upacara keagamaan,sosial hingga perilaku politik. Sedangkan di Jember selatan kyai yang cukup berpengaruh adalah KH. Jauhari Zawawi Pengasuh Pondok As Sunniah Kecamatan Kencong.

Meski dalam perkembangannya kyai yang berpengaruh tersebut wafat, secara otomatis akan digantikan perannya oleh putranya yang dikenal dengan sebutan lora oleh masyarakat Madura, dan Gus oleh masyarakat Jawa (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Sementara di kawasan Jember Selatan pesisir, meski kyai memiliki porsi dan pengaruh, tetapi masyarakat muslim lebih rasional dalam berpolitik (Huda, 1997:39). Hubungan kyai-santri atau guru-murid lebih longgar, artinya pilihan politik kyai tidak serta merta akan diikuti oleh pilihan politik santri. Setiap aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki maksud dan tujuan, dan tindakannya tertuju pada maksud dan tujuan tersebut. Meskipun posisi kyai terbilang kuat sebagai pembimbing agama, namun tidak mampu menggiring massanya mengikuti pilihan politik kyai. Kondisi tersebut memiliki konsekuensi bahwa tidak selamanya Partai Politik yang didukung oleh kyai dapat memenangkan secara telak di wilayah Jember Selatan. Berbeda dengan Jember Utara, tingkat kemenangan partai politik yang didukung oleh kyai NU lebih tinggi. Perubahan-perubahan pilihan politik kyai sangat berpengaruh pada kecenderungan partisipasi politik santri.

Kabupaten Jember dengan penduduknya yang multikultural dan plural, terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras dan antar golongan dapat menjadikan setiap kelompok keagamaan dalam Islam dapat dimanfaatkan sebagai basis pendukung setiap kepentingan politik. Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan partai-partai politik Islam secara kuantitatif untuk memperebutkan pengaruh pada lahan politik yang sama. Keterwakilan umat Islam bukan lagi dalam kapasitas perbedaan ideologis atau bermakna pembelaan kepentingan umat Islam. Tetapi konteks ini, pragmatisme politik praktis bahkan cenderung menjadi lebih menonjol dibanding usaha pembelaan kepentingan komunitas dan agama (Haris *et al*, 2002: 09).

Masa reformasi tahun 1998 membuat peran NU sebagai organisasi para kyai dipandang masa strategis tetapi juga dilematis (Fealy, 1998:277). NU yang terdiri dari elit politik, sesuai dengan paham *Sunni*, memiliki kewajiban mentaati pemerintah. Sebagai elit agama, NU mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama

dengan cara *amar makruf nahi munkar*. Multi peran seperti inilah yang seringkali menjadikan NU serba salah dan dilematis. Peran dan tanggung NU dalam menegakkan syariat Islam *ahlussunnah waljamaah*, negara dan masyarakat secara bersamaan, tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan.

Menurut Nurhasan (Wawancara, 26 Agustus 2016), sikap partisan NU Cabang Jember dalam politik praktis telah memetakan masyarakat Islam ke dalam beberapa kelompok politik yang tidak sepaham. Peran NU hampir tidak memiliki pengaruh dalam menentukan sikap politik pengikutnya dari kalangan santri. Kondisi tersebut membuat sedikit sulit untuk dieksploitasi oleh tokoh-tokoh keagamaan dengan dalih memperjuangkan misi politik Islam.

Perubahan sosial masyarakat Jember yang sedemikian pesat mengikuti perkembangan politik nasional, sedikit banyak tentu mempengaruhi kultur keagamaan di kalangan umat Islam. Perubahan menonjol tampak pada polarisasi ideologis yang secara potensial, tampak tergantikan oleh kepentingan politik praktis. Sekat tersebut tidak hanya terjadi antara kyai satu dengan yang lain, melainkan juga dengan beberapa kelompok masyarakat Islam yang tidak separtai. Perkembangan sosial dan politik menunjukkan bahwa masyarakat Islam semakin independen dalam menentukan pilihan afiliasi politiknya (Haris *et al*, 2002:10).

Sikap tradisi semacam ini telah melahirkan sikap tersendiri terhadap politik. Bukan hanya peristiwa dan kegiatan politik yang dianggap bagian integral dari agama, tetapi juga tindakan politik yang dilakukan, baik bersifat kompromisme maupun radikalisme (Soon, 2008:48). Menurut hemat peneliti, kenyataan ini juga terjadi dalam internal PCNU Jember. Politisi muslim yang terlahir dari PCNU Jember memiliki kewibawaan dan pengaruh lebih tinggi dari pada politisi profesional.

Menurut hemat peneliti, kyai NU Cabang Jember yang terlibat dalam politik praktis diuntungkan dengan simbol NU yang secara otomatis melekat, sehingga dengan mudah memobilisasi massa melalui rangkaian kegiatan seperti: yasinan, tahlilan, ziarah kubur, dan haul atau peringatan hari kematian. Kegiatan keagamaan

tersebut, ketika menjelang Pemilihan Kepala Daerah kerap dimanfaatkan untuk menopang perolehan suara calon yang didukungnya.

Perbedaan afiliasi politik kyai juga bukan mustahil menimbulkan respon beragam dari komunitas masyarakat yang sebelumnya menempatkan kyai sebagai referensi utama pengambilan keputusan yang harus ditaati (Waris, 2007: 57). Situasi ini potensial menjadikan tokoh NU Cabang Jember dalam konotasi dan lingkup pengaruh kulturalnya yang khas. Kondisi tersebut pada perkembangannya menyebabkan sebagian masyarakat yang semulamenggantungkan sikap politiknya pada kehendak kyai NU Cabang Jember telah kehilangan respektasinya karena perbedaan sikap politik yang ditunjukkan kyai NU Cabang Jember.

Potensi besar yang dimiliki NU Cabang Jember menyebabkan tekad *khittah* NU untuk menjaga jarak dengan politik dan kekuasaan mulai menipis. Ditambah, tradisi berpolitik yang sudah mendarah daging pada warga NU Cabang Jember, terutama para elitnya, sulit untuk tidak terlibat dalam politik praktis. KH. Muhyidin Abdusshomad, sebagai seorang tokoh gerakan kembali ke *khittah* 1926 akhirnya terpengaruh untuk membentuk wadah penyaluran politik warga NU Cabang Jember (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

BAB 5. BENTUK PARTISIPASI POLITIK NAHDLATUL ULAMA CABANG JEMBER TAHUN 1998-2015

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 3. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Rush dan Philip Althoff. Menurut Rush dan Philip Althoff 2003 (dalam Damsar, 2013: 185), partisipasi politik dapat berbentuk: menduduki jabatan politik, mencari jabatan politik, keanggotaan ikut maupun pasif organisasi politik, maupun semi politik. rapat umum, diskusi politik, pemungutan suara, dan apati politik.

5.1 NU dan Tuntutan Politik pada masa Reformasi

Pasca mukatamar ke 27 di Situbondo, secara struktural NU nyaris tidak berpolitik. Kekuatan NU hanya dimanfaatkan oleh 3 partai yang ada (PPP, PDI, dan Golkar). Namun saat Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Presiden BJ. Habibie, KH Ma'ruf Amin diberi mandat oleh Ketua PBNU KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk menemui Wiranto yang pada saat tersebut sebagai Panglima ABRI. KH. Ma'ruf Amin melakukan negosiasi politik dengan Wiranto agar NU diajak partisipasi dalam pemerintahan. Tetapi negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil, terbukti saat susunan kabinet Presiden BJ Habibie diumumkan, tidak satupun menteri yang menjadi representasi NU (Soon, 2008:220).

KH. Ma'ruf Amin yang dikecewakan oleh Presiden Habibie, menggelar rapat PBNU di Hotel Alia Jakarta. Seluruh peserta rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan PCNU se Indonesia ikut merasa kecewa dengan sikap Presiden Habibie, sehingga peserta rapat mengajukan agar NU membentuk partai politik. Meskipun mendapat respon yang beragam terkait usulan tersebut, namun disepakati NU membentuk partai sebagai wadah penyaluran politik warga NU (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Hasil kesepakatan rapat di Hotel Alia langsung disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin ke kediaman Gusdur. Kyai Ma'ruf kembali mengungkapkan pemahamannya tentang *khittah* NU. *Khittah* dikatakan sebagai cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak, sehingga politik dianggap bagian dari *khittah*. Pada situasi tertentu, tidak berpolitik bisa menjadi bagian dari *khittah*.

Momentum awal reformasi tersebut, mengharuskan NU berpolitik, dengan membentuk partai politik. Akhirnya peserta rapat bersepakat, NU membentuk partai agar suara NU dipertimbangkan oleh pemerintah. NU membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti hasil rapat PBNU, sebab jika NU membentuk partai langsung, justru akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Disepakati juga, hubungan NU dengan partai yang akan dibentuk merupakan hubungan historis, aspiratif, dan kultural, karena NU tidak diperbolehkan memiliki hubungan apapun dengan partai politik secara struktural (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Tim khusus yang terdiri dari lima anggota ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU, pada 3 Juni 1998. Sesuai hasil kesepakatan rapat, Tim Lima diketuai oleh Kiai Ma'ruf. Anggotanya KH. M Dawam Anwar selaku Khatib Aam PBNU tahun 1998, KH. Dr. Said Aqil Siradj selaku Wakil Kitab Aam PBNU, Rozy Munir selaku Ketua PBNU, dan Ahmad Bagdja selaku Sekjen PBNU. Selain dinamika di PBNU, terjadi pula dinamika di level masyarakat NU yang juga mewacanakan pendirian partai. Tokoh utama poros masyarakat NU itu adalah KH. Cholil Bisri dari Rembang, KH Yusuf Muhammad dari Jember, dan Matori Abdul Djalil (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016)

Para kyai di Kantor PWNU Jawa Timur mendesak Kyai Cholil sebagai tokoh yang dianggap lebih berpengalaman dalam bidang politik, untuk secepatnya pendirian partai dilakukan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam acara istighosah di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1998. Kyai Cholil keberatan terhadap aspirasi tersebut dengan alasan lebih memilih aktif di Pesantren dan tak lagi beraktivitas politik. Karena desakan terus berlanjut, tanggal 6 Juni 1998 kyai Cholil mengundang 20 kyai ke rumahnya di Rembang untuk membicarakan partai. Pertemuan dihadiri lebih dari 200

kyai, kemudian dibentuk Tim Lajnah terdiri 11 orang yang diketuai Kyai Cholil dan Sekretaris Gus Yus dari Jember. Dibentuk juga Tim Asistensi Lajnah terdiri 14 orang yang diketuai Matori Abdul Djalil (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Terbentuknya dua tim itu dikhawatirkan akan memunculkan sejumlah partai dari NU. Hal tersebut justru dinilai tidak strategis bagi posisi tawar warga NU. Tim Lajnah kemudian dimasukkan dalam tim bentukan PBNU dengan memasukan kyai Cholil dan Gus Yus dalam Tim PBNU. Tim PBNU dibantu Tim Asistensi NU yang diketuai Arifin Junaedi selaku Wakil Sekjen PBNU dengan anggota Muhyiddin Arubusman, M. Fachri Thaha Ma'ruf, Abdul Aziz, Andi Muawiyah Ramli, Nasihin Hasan, Lukman Lakim Saifudin dari Politisi PPP, Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim tersebut mengadakan pertemuan di Bandung dengan mengundang seluruh PWNU se-Indonesia yang dihadiri 27 perwakilan pada 4 Juli 1998 (Soon, 2008: 221).

Keinginan NU untuk mendirikan wadah politik, menemukan relevansi ketika PBNU mulai menanggapi tuntutan warga NU dari berbagai daerah. Kegiatan diskusi terus dilakukan secara intensif guna mematangkan rumusan konseptual tentang pembentukan partai politik yang akan diusulkan kepada PBNU. Bahkan, beberapa tokoh NU Jember seperti KH. Yusuf Muhammad (Gus Yus) dan KH. Muhid Muzadi, turut ambil bagian secara langsung dalam setiap proses pembentukan partai politik yang difasilitasi PBNU. Secara resmi PKB berdiri pada tanggal 23 Juli 1998 di halaman Rumah Gus Dur Ciganjur Jakarta selatan. DPP PKB tersebut dipimpin oleh KH. Ma'ruf Amin (Soon, 2008: 229).

Menindak lanjuti berdirinya DPP PKB, pada tanggal 3 Agustus 1998, tim lima yang dibentuk PWNU Jawa Timur menunjuk lima orang untuk memimpin DPW PKB Jawa Timur periode pertama. Selanjutnya secara maraton tanggal 10 dan 19 Agustus 1998, 5 orang yang ditunjuk berhasil membentuk susunan pengurus lengkap melalui rapat gabungan dengan Syuriyah dan Tanfidziyah PWNU Jawa Timur. Tanggal 28 Agustus 1998 Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur

dideklarasikan bersamaan dengan Musyawarah Kerja Wilayah NU Jawa Timur di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kabupaten Probolinggo. Menyusul kemudian di beberapa Kabupaten dan Kota Madya se Indonesia juga dibentuk Dewan Pengurus Cabang atau DPC PKB, termasuk di Kabupaten Jember (Shihab, 2003:5).

Terbentuknya DPP PKB tanggal 23 Juli 1998, langsung di sikapi oleh PBNU dengan persiapan pembentukan DPP hingga DPC PKB. Tim Lima, yang terdiri dari: KH. Halim Muhammad sebagai Ketua Tim, KH. Saiful Bahri sebagai Sekretaris, dibantu Saiful Islam, Saiful Bari, dan Mansur Sholeh sebagai anggota (lihat Lampiran F). Tanggal 28 Juli 1998, Tim Lima menggelar rapat pertama di Kantor PCNU Jl. Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates Jember. Rapat pertama tersebut, dihadiri K.H Khotib Umar dan Muhson Sujono selaku Ketua PCNU, dan Lukman Yasir Selaku Sekretaris PCNU. Selanjutnya untuk memperlancar tugas tim lima, kemudian dibentuk Tim Asistensi (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Tim Lima menggelar rapat koordinasi dengan PCNU Jember, dan Kencong, GP Anshor Jember, dan tokoh dari Golkar Baihaqi Idris tanggal 2 Agustus 1998. Rapat koordinasi tersebut berisi himbauan terhadap kader NU untuk ikut membantu proses pendirian DPC PKB Jember, meskipun sedang menjadi pengurus partai lain. DPC PKB Jember berhasil dibentuk pada 30 Agustus 1998. Setelah berkoordinasi dengan K.H Khotib Umar, kepengurusan DPC PKB untuk sementara boleh diambil dari pengurus PCNU. Selanjutnya disepakati, Muhson Sujono selaku Ketua PCNU disepakati sebagai Ketua Umum DPC PKB Jember yang pertama. Setelah persiapan dianggap rampung, DPC PKB Jember dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 1998 di Alun-alun Kota Jember (Razak, 2002: 11).

Pasca dibentuknya DPC PKB Jember mengindikasikan mengindikasikan adanya pergeseran sikap, orientasi, dan perilaku politik. PCNU Jember hingga ke tingkat Pengurus Ranting pada tahun 1998 mulai mengubah perilaku politiknya dari orientasi kultural yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, menjadi orientasi kekuasaan (Moesa & Maschan, 1999:12). Melalui DPC PKB Jember, tokoh NU Cabang Jember hingga guru ngaji di pelosok desa merasa berkewajiban menata

bangsa Indonesia (lihat Lampiran F). PKB dianggap sebagai satu-satunya partai yang dibentuk oleh NU atas aspirasi masyarakat *nahdliyyin*.

Peran politik NU melalui jalur kepartaian ini, menjadi awal kembalinya NU ke arena politik praktis. Menurut Mas'od (1991: 63), terbentuknya suatu partai politik disebabkan pengalaman sejarah yang memperkuat kesadaran politik dari satu atau beberapa kelompok, dominasi suku, konflik yang sudah berlangsung lama, dan dominasi suatu kelas tertentu. Berdasarkan teori tersebut, peneliti mengkaji pembentukan PKB sebagai wadah politik NU bukan hanya sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga berperan sebagai pengatur konflik.

Keterlibatan tokoh NU Cabang Jember dalam mengurus partai politik menemukan relevansinya dengan Hasil Rapat Pleno PBNU IV tanggal 24 Juli tahun 1999 di Jakarta. Melalui rapat tersebut, PBNU secara struktural menghimbau warga *nahdliyyin* untuk memberikan dukungan serta memelihara PKB sebagai satu-satunya wadah penyaluran aspirasi politik NU. Melalui DPC PKB, aktivitas yang dilakukan NU Cabang Jember lebih sering bergesekan dengan wilayah politik praktis. Sehingga kegiatan NU yang semestinya bercorak sosial keagamaan mulai tergantikan dengan aktivitas-aktivitas politik. Wajah kekinian NU Jember melalui sayap politiknya mulai menata target yang lebih jelas melalui politik (Alaena, 2000: 103-104).

Dukungan PCNU Jember atas instruksi PBNU terhadap PKB tidak sia-sia, partai tersebut tercatat partai paling banyak menjadi saluran aspirasi warga NU. PKB menduduki lima besar peraih suara, mengalahkan suara partai-partai berbasis massa Islam lain di Kabupaten Jember, seperti PPP, PAN dan PK. Keberhasilan ini cukup wajar, mengingat wadah politik PKB merupakan yayoi NU penguasa kerajaan-kerajaan kecil, seperti pondok pesantren memiliki massa loyal kultural dari para santri, komunitas Pesantren, pendukung dan simpatisan.

Berdirinya DPC PKB Jember bagi NU Cabang Jember dianggap sebagai jembatan kemakmuran masyarakat. PKB dianggap satu-satunya partai politik yang dijadikan wadah penyaluran aspirasi bagi warga NU Jember. Tahun-tahun awal

setelah pendirian DPC PKB Jember, sejumlah kyai NU Jember bersatu padu mengkampanyekan PKB. Di sejumlah Pesantren dikibarkan bendera PKB yang disandingkan dengan bendera NU. Bahkan Pengurus Harian Majelis Cabang atau MWC NU langsung dijadikan Pengurus Anak Cabang PKB.

PKB Jember dianggap memiliki hubungan simbiosis mutualisme dalam keberlangsungan NUCabang Jember. PCNU memperjuangkan masyarakat melalui kegiatan sosial keagamaan, sedangkan DPC PKB memperjuangkan masyarakat melalui jalur politik. Dengan demikian, melemahnya PKB, dianggap melemahnya NU. Setiap pelaksanaan Pemilihan Umum, PCNU selalu menjadi mitra PKB.

5.2 NU Cabang Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 1999-2000

Pemilihan Legislatif tahun 1999 sebagai Pemilihan Umum pertama yang dilaksanakan tanpa intervensi pemerintah selama rezim Orde Baru. Pileg tahun 1999 tersebut, diikuti oleh 48 partai politik, termasuk PKB yang mendapat nomor urut 35. Sebagai partai yang dibentuk oleh NU, PKB dengan suka rela dikampanyekan oleh berbagai santri dan kyai di Kabupaten Jember. Adanya keterlibatan santri dan kyai selama kampanye, perolehan suara PKB di Jember lebih tinggi dibanding suara yang diperoleh partai lain. PKB Jember mampu mendulang perolehan suara sebanyak 498.989 suara untuk DPRD tingkat II, 500.602 untuk DPRD tingkat I, dan 406.410 untuk DPRD. Dengan perolehan suara tersebut, PKB berhasil mendudukkan 17 orang di DPRD Jember, 3 orang di DPRD I, dan 3 orang di DPR RI (Razak, 2002: 21).

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempatkan 11 wakilnya, Partai Golongan Karya menempatkan 4 wakilnya, Partai Persatuan Pembangunan mendudukkan 3 wakilnya, Partai Amanat Nasional menempatkan dua wakilnya, Partai Sunni menempatkan 1 wakilnya, dan Partai Kebangkitan Umat menempatkan 1 wakilnya (DPRD Jember, 2007: 220).

DPRD Kabupaten Jember memiliki empat fraksi hasil Pemilihan Umum ditambah satu fraksi TNI Polri yang beranggotakan lima orang. Empat fraksi itu adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Fraksi Karya Suni yang merupakan gabungan Partai Golkar dengan Partai SUNI, dan Fraksi Persatuan Amanat Umat yang merupakan gabungan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Umat. Perolehan suara partai secara keseluruhan kemudian diproyeksikan dalam pembagian kursi di DPRD Kabupaten Jember. Kursi di dewan diperoleh berdasarkan pembagian suara partai secara keseluruhan dengan 45 kursi yang diperebutkan. 1 kursi Dewan setara dengan 30.126 suara, sehingga dari hanya 6 partai politik yang berhak mengajukan perwakilan di dewan, antara lain PKB, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Partai Demokrat, PAN, dan PKPB (DPRD, 2007: 222).

Fraksi Kebangkitan Bangsa sebagai penguasa kursi mayoritas menempatkan salah satu wakilnya bernama Muchson Sudjono sebagai ketua DPRD Jember. Politisi yang juga Ketua Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember tersebut dibantu oleh tiga Wakil Ketua, yakni Baharuddin Nur dari Fraksi Persatuan Amanat Umat, Machmud Sardjuno dari Fraksi Karya Suni, dan Warsono Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (KPU Jember, 1999: 22).

Meskipun DPC PKB Jember menang dalam Pemilihan Legislatif, tetapi dalam Pemilihan Eksekutif atau Bupati Jember, PKB mengalami kekalahan. Saat dilakukan penjangkaran ditingkat DPC PKB Jember, muncul dua nama bakal calon yang sama-sama dari kalangan warga NU, yakni K.H Yusuf Muhammad atau Gus Yus Pengasuh Pondok Pesantren Darus Sholah dan Muhson Sujono. Berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Cabang, aspirasi kyai lebih memilih Gus Yus. Akhirnya Gus Yus disepakati maju sebagai calon Bupati tahun 2000. Sedangkan Muhson Sujono diminta mengawal melalui DPRD (Razak, 2002: 22).

Pemilihan Bupati dengan dipilih oleh Dewan, secara logika dengan bekal 17 kursi yang diraih PKB, semestinya Gus Yus terpilih sebagai Bupati melawan Samsul Hadi Siswoyo dan Moh. Zaenuri. Namun terjadi kenyataan yang belum terprediksi. Meski sejak awal PKB berkoalisi dengan PAN yang memiliki 2 kursi di Dewan, Gus Yus tidak lolos sebagai Bupati. Gus Yus memperoleh 19 suara yang terdiri dari suara PKB dan PAN, sedangkan Samsul Hadi Siswoyo memperoleh 22 suara, yang terdiri

dari 12 suara PDIP, lima suara Fraksi TNI/Polri, empat suara PPP, dan satu suara dari Partai Nahdlatul Ummah. Dukungan terhadap Zaenuri seluruhnya dari Golkar (DPRD Jember, 2007: 223).

Tabel 5.1 Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2000

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH SUARA
1	Yusuf- Kadarisman	PKB dan PAN	19 suara
2	Samsul Hadi - Bagong Strisnadi	F-PAU	22 suara
3	Zaenuri- Harsono Mulyadi	Golkar- PDIP	4 suara

Sumber: DPRD Jember, 2007.

Kekalahan Gus Yus saat dicalonkan sebagai Bupati Jember memicu kekecewaan di tubuh warganahdliyyin. Fraksi Kebangkitan Bangsa dinilai tidak serius menggalang upaya kemenangan Gus Yus. Menyikapi hal ini warga nahdliyyin mendatangi gedung DPRD Jember dan menggelar aksi massa setelah pemilihan Bupati tersebut. Warga nahdliyyin menyatakan penolakan atas hasil pemilihan tersebut, karena dinilai mengingkari aspirasi masyarakat Jember yang mayoritas berbudaya nahdliyyin.

Warga NU menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahan Samsul Hadi Siswoyo dengan menjadi oposisi. Salah satu kebijakan dikritisi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama adalah masalah relokasi Pedagang Kaki Lima. Sementara Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak bersikap reaktif atas kekecewaan warga Nahdliyyin, bahkan cenderung hati-hati.

5.3 NU Cabang Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2004-2005

Menjelang Pemilihan Legislatif tahun 2004, konsolidasi PKB dengan NU semakin diperkuat. Sebab, jumlah kursi yang ada di Dewan bertambah menjadi 50 yang sebelumnya hanya 45 kursi dan itupun 5 kursi yang ada sudah dimiliki Fraksi TNI/Polri. Sementara kursi khusus TNI/Polri tahun 2004 dihapus. Selain

bertambahnya kursi, Pemilihan Legislatif tahun 2004 memiliki sistem yang berbeda dibanding tahun 1999. Alokasi kursi yang ada dibagi berdasarkan Daerah Pemilihan atau Dapil, dengan sistem proporsional semi terbuka. Artinya, calon yang bisa mencapai Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP langsung ditetapkan sebagai calon yang lolos. Sedangkan jika tidak memenuhi BPP, maka keterpilihan caleg dipilih berdasarkan nomor urut (Razak, 2012: 33).

Pemilihan Legislatif tahun 2004, DPC PKB mengakomodasi Caleg dari kalangan NU struktural, yakni Misbahus Salam selaku Sekretaris PCNU Jember. DPC PKB Jember menunjuk Chairul Shaleh sebagai Manajer Kampanye. Kampanye dilakukan dengan intens melalui berbagai Badan Otonom NU. GP Anshor Jember dibawah kepemimpinan Miftahul Ulum setiap melaksanakan kegiatan di lapangan dibarengi dengan mengkampanyekan Misbahus Salam. Bahkan PCNU hingga PR disiapkan untuk ikut memenangkan Caleg yang diusung PKB. Guru ngaji di pelosok desa, hingga kyai Pesantren terlibat dalam kampanye melalui ceramah agama.

Kampanye dengan melibatkan kyai pesantren memudahkan proses mobilisasi massa, terutama di kalangan santri. Sejumlah kyai yang ikut terjun mengkampanyekan Misbahus Salam antara lain: K.H Khotib Umar, K.H Muhyiddin Abdusshomad, K.H Mansur Sholeh, K.H Syahid Jauhari, K.H Najumudin, K.H Haromain, bahkan K.H Raden As'ad Syamsul Arifin ulama asal Situbondo. Sebagai pamungkas, DPC PKB Jember juga mendatangkan Gus Dur ke Jember (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

PKB mendapat kursi terbanyak di DPRD Jember tahun 2004. Perolehan ini tidak terlepas dari adanya proses mobilisasi massa oleh kyai dalam bentuk ceramah keagamaan yang diselingi ajakan untuk memilih salah satu calon dalam pemilu. Adanya ceramah agama ini membuat PKB mendapat dukungan dari para santri, keluarga dan masyarakat sekitar.

Tabel 5.2 Hasil Pemilihan Legislatif Jember tahun 2004

Peringkat	Partai politik	Perolehan suara	Prosesntase	Kursi Dewan
1	PKB	487.894	36,83	17
2	PDIP	222.244	16,78	8
3	Golkar	174.929	13,21	6
4	PPP	126.533	9,55	6
5	PD	77.027	5,81	4
6	PAN	62.646	4,73	3
7	PKPB	28.715	2,17	1
8	PKS	27.520	2,08	-
9	PBR	18.418	1,39	-
10	PBB	11.740	0,88	-
11	PPNUI	9.949	0,75	-
12	PSI	9.939	0,75	-
13	PNBK	8.982	0,67	-
14	Partai PDI	8.816	0,66	-
15	PDS	8.110	0,61	-
16	Partai Patriot Pancasila	7.647	0,57	-
17	PPD	6.736	0,51	-
18	PNI Marhaenise	5.678	0,43	-
19	PBSD	4.499	0,34	-
20	PKB Indonesia	4.434	0,33	-
21	Partai Merdeka	3.629	0,27	-
22	Partai Pelopor	3.572	0,26	-
23	Partai PDK	3.370	0,25	-
24	Partai PIB	1.933	0,14	-
	Jumlah	1.324.560	100,0	45

Sumber : Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe dan Sekarang 1931-2007, halaman 229.

Berdasarkan table di atas, pemilu tahun 2004 di Kabupaten Jember PKB sebagai pemenang pertama dengan memperoleh 487.894 suara. Disusul kemudian oleh PDI Perjuangan dengan memperoleh 222.244 suara. Kemenangan ini

dipengaruhi oleh sosial politik Kabupaten Jember yang mayoritas dihuni etnis Madura yang memiliki ikatan kultural kuat dengan kyai.

Suara yang diperoleh PKB, langsung ditindak lanjuti oleh PCNU dengan menggelar rapat yang dihadiri oleh 26 MWC NU. Hasil rapat kordinasi tersebut dihasilkan keputusan untuk mendudukan Madini Farouq atau Gus Mamak sebagai Ketua Dewan. Setelah melakukan lobi terhadap sejumlah Fraksi yang ada di Dewan, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrat memberikan dukungan terhadap Gus Mamak, sehingga Gus Mamak terpilih sebagai Ketua Dewan secara aklamasi dengan formasi Mahmud Sardjuno dari Golkar, dan Kusen Andalas dari PDIP.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun 2005 dilaksanakan dengan sistem desentralisasi. Hal tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, peta sosial politik mengalami perubahan yang signifikan, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pilihan terhadap sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan koreksi atas Pemilihan Kepala Daerah terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 dilaksanakan dengan proses pemilihan langsung.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokrastis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil telah mengubah pola pikir masyarakat. Masyarakat secara umum memiliki kesempatan memilih Kepala Daerah sesuai dengan keinginan. Masyarakat bisa bertindak sebagai pemilih maupun yang

dipilih dalam pencalonan Kepala Daerah. Keadaan yang demikian, menyebabkan partai politik yang telah terbentuk untuk tampil mengadu nasib melalui jalur politik.

Terpilihnya Gus Mamak sebagai Ketua DPRD Jember, menjadi awal terjadinya konflik internal di PKB. Solidaritas PKB kembali diusik menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati tahun 2005. Saat penjaringan bakal calon, Gus Mamak bersama pengurus inti memberikan dukungan terhadap Djalal. Sedangkan Miftahul Ulum bersama 23 DPAC mendukung Samsul Hadi Siswoyo (Hasil wawancara dengan Junaidi, 03 Januari 2017).

Meski penjaringan belum resmi dilakukan oleh PKB, kondisi internal DPC PKB Jember sudah mulai terpolarisasi. Pendukung petahana Siswoyo dan Djalal yang melibatkan DPC dan DPAC PKB kerap melakukan manuver. 23 DPAC beberapa kali menggelar pertemuan dengan Samsul, meminta Samsul maju sebagai calon Bupati dari PKB. Sedangkan 29 DPAC PKB juga mengklaim melakukan pertemuan dengan Djalal. Sehingga perbedaan tersebut, semakin mengarah kepada konflik internal.

Terhitung sejak tanggal 26 Januari hingga tanggal 05 Februari 2004, DPC PKB Jember resmi membuka penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hingga waktu terakhir, ada 20 orang pendaftar, namun yang mengembalikan formulir hanya 18 orang, termasuk Samsul dan Djalal. Ketika mengembalikan formulir, Djalal dikawal oleh 21 DPAC PKB, dan Samsul dikawal oleh 24 DPAC. Padahal jumlah DPAC yang ada di Jember hanya 31 DPAC. Dari 18 orang yang mengembalikan formulir, hanya lima orang yang dinyatakan lolos administrasi, yakni: Djalal, Samsul Hadi Siswoyo, Madini Farouq, Endang Ma'ruf Randi, dan Juwito (Razak, 2012: 36-37).

Semenjak dilakukan penjaringan, muncul berbagai pandangan dalam tubuh PKB. Lima orang yang dinyatakan lolos tersebut saling berburu rekom. Sebulan kemudian, ada surat dari Gus Dur yang mengusulkan Samsul Hadi Siswoyo dan Madini Farouq agar ditetapkan sebagai Cabub dan Cawabub pada Pemilihan 2005 mendatang. Beberapa waktu kemudian, juga muncul rekomendasi dari DPP PKB yang menetapkan Djalal sebagai Cabub Kabupaten Jember. Permasalahan semakin

meruncing ketika Gus Mamak meyakini rekom PKB hanya untuk Djalal, sedangkan Miftahul Ulum mendukung penuh Samsul Hadi Siswoyo, dengan alasan mengamankan rekom Gus Dur (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Setelah melalui proses panjang, KPU Jember menyatakan menerima pencalonan Djalal-Kusen oleh PKB yang berkoalisi dengan PDIP. Sementara Samsul Hadi Siswoyo berpasangan dengan Baharudin Nur juga mendaftar ke KPU melalui PPP dan gabungan partai non parlemen. Konflik internal yang terjadi dalam PKB melahirkan dualisme kepengurusan PKB. Hal tersebut mempengaruhi gerak politik PKB. Konflik ini dapat dilihat pada kasus Pemilihan Kepala Daerah langsung Kabupaten Jember tahun 2005. PKB yang berada di bawah kendali Abdurrahman Wahid menyetujui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Syamsul Hadi Siswoyo-Baharudin. Sementara DPC PKB Jember yang berkoalisi dengan PDIP mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati MZA Djalal- Husen Andalas (Wahyu, 2005: 16).

Terjadinya konflik dalam tubuh PKB Jember, mempengaruhi elektabilitas PKB pada Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun 2005. Kyai NU Jember yang memiliki pandangan politik yang berbeda saling mencari jalan untuk memobilisasi massa, bahkan Gus Dur turun langsung ke Jember untuk memenangkan Samsul-Baharudin. Meskipun Samsul-Baharudin didukung penuh oleh Gus Dur selaku Dewan Syura DPP PKB, namun masih kalah dengan MZA Djalal-Kusen yang didukung oleh DPC PKB Jember berkolasi dengan PDIP.

Tabel 5.3 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005

NOMOR	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	HASIL SUARA
1	Samsul-Baharudin	PPP, partai non parlemen	2.90.092
2	MZA Djalal-Kusen	PKB. PDIP	608.053
3	Mahmud-Hariyanto	Partai Golkar	140.303

Sumber: KPU Jember Tahun 2005.

Berdasarkan data hasil Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun 2005 di atas, meskipun Samsul-Baharudin sudah didukung langsung oleh Gus Dur, kalah suara dengan Djalal-Kusen yang didukung oleh DPC PKB Jember. Meski Samsul-Baharudin pasangan calon yang diusung PKB versi Miftahul Ulum kalah, namun Miftahul Ulum berhasil menduduki Kantor DPC PKB yang terletak di Jalan Kalimantan Summersari Jember. Sedangkan kepengurusan Gus Mamak dibekukan oleh DPP PKB, meskipun belum ada pernyataan tertulis. Sejak saat itu, DPC PKB Jember memiliki dualisme kepemimpinan. Satu sisi Pengurus Inti DPC PKB Jember dan sejumlah DPAC dikendalikan Gus Mamak. Di sisi lain, 23 DPAC lainnya dikendalikan Miftahul Ulum. PKB versi Gus Mamak memilih untuk pindah kantor ke Jalan Imam Bonjol. Sejak saat itu, secara resmi PKB Jember terbelah menjadi dua (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

PKB kubu Miftahul Ulum dipegang pengurus kertaker, dan selang waktu tiga bulan, menyiapkan Musyawarah Cabang Luar Biasa untuk memilih kepengurusan baru. Kemudian secara defacto, Miftahul Ulum menjadi Ketua Umum DPC PKB Jember menggantikan kepengurusan Gus Mamak yang belum tuntas. Meski kepengurusan DPC PKB Jember dipegang Miftahul Ulum, namun konflik bergeser ke dalam gedung DPRD. Fraksi Kebangkitan Bangsa pecah menjadi dua Fraksi, yakni Fraksi pro Miftahul Ulum, dan Fraksi pro Gus Mamak. Ada sembilan anggota Fraksi yang mendukung Gus Mamak, dan ada enam anggota Fraksi yang mendukung Miftahul Ulum (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 03 Januari 2017).

Konflik di Gedung DPRD juga merembet ke dalam GP Anshor. GP Anshor yang dipimpin Abd. Syukur dan beberapa pengurus merapat ke Gus Mamak, sedangkan 18 Anak Cabang Anshor yang menamakan diri sebagai Forum Komunikasi Anak Cabang atau FKAC yang diketuai oleh Hafidi Cholis merapat ke Miftahul Ulum. Akibatnya, GP Anshor dibawah Abd. Syukur dibekukan dengan Surat Keputusan Pembekuan nomor 467/PP/SK-01/IV/2007, tertanggal 24 April 2007 yang ditanda tangani oleh Chairul Shaleh Rasyid dan Malik Haramain (Razak, 2012: 23)

Bulan Agustus tahun 2007, kepengurusan GP Anshor Jember kembali ditata dengan menyelenggarakan Konferensi Istimewa. Babun Suharto dalam Konferensi tersebut terpilih menjadi Ketua GP Anshor. Babun Suharto menunjukkan solidaritasnya dengan Miftahul Ulum. Namun, Abd. Syukur tetap melakukan reaksi penolakan dengan membentuk Forum Silaturahmi Kader atau FORSA (Hasil wawancara dengan AyubJunaidi, 3 Januari 2017).

5.4NU Cabang Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2009-2010

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif Jember tahun 2009, DPC PKB Jember dikagetkan dengan munculnya DPC PKB tandingan versi Gus Mamak. PKB versi Gus Mamak yang diketuai oleh Abdul Haris dibantu Udi Suseno sebagai Sekretaris langsung membuka kantor di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates Jember. DPC PKB tandingan tersebut mengklaim juga mengantongi SK dari DPP PKB.

Saat Pemilihan Legislatif memasuki tahap penyerahan daftar Calon Legislatif ke KPU, PKB tandingan tersebut menyerahkan daftar Caleg mendahului PKB versi Miftahul Ulum. Tindakan PKB tandingan dinilai sebagai upaya kudeta terhadap DPC PKB yang sah. Sejumlah pengurus PKB versi Miftahul Ulum mendatangi KPU Jember meminta agar daftar Caleg versi PKB tandingan ditolak, namun KPU Jember tidak merespon permintaan DPC PKB versi Miftahul Ulum, sehingga sejumlah pengurus lainnya mendatangi KPU mengambil paksa daftar Caleg versi PKB tandingan. Akibat konflik yang sedang dihadapi DPC PKB Jember, perolehan suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 merosot dibanding Pemilu tahun 2004.

Tabel 5.4 Hasil Pemilihan Legislatif Jember Tahun 2009

NO	NAMA	DAPIL	JUMLAH	TOTAL SUARA
		NO.URUT	SAUARA	PKB
1.	Ayub Junaidi	I/1	5.591	23.535
2.	Mudastir Mudzhar	II/1	7.183	89.191

NO	NAMA	DAPIL		JUMLAH	TOTAL SUARA
		NO.URUT		SAUARA	PKB
3.	Moch. Hafidi Cholis	III/1		6.077	17.554
4.	Miftahul Ulum	IV/1		5.280	23.128
5.	Ahmad Fauzi	VI/3		4.802	18.922
6.	Abdul Halim	VI/1		6.539	18.658
		Jumlah		35.472	126.712

Sumber: KPU Jember, Tahun 2009.

Berdasarkan data di atas, PKB hanya mampu meraih enam kursi Dewan. Enam kursi tersebut disumbang oleh enam Dapil, masing-masing satu kursi. Perolehan suara PKB tersebut, masih masuk dalam tiga urutan terbesar. Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak, diikuti PDIP. Pemilihan Legislatif tahun 2009 tersebut, DPC PKB Jember mampu mendudukkan Miftahul Ulum sebagai Wakil Ketua DPRD, Ayub Junaidi sebagai Ketua Komisi D (hasil wawancara dengan Junaidi, 03 Januari 2017).

Secara organisatoris NU Cabang Jember dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun 2010 dalam berbagai alternatif. Salah satunya dengan mengusung kader sendiri. Akhirnya NU Cabang Jember memutuskan untuk mendukung dan mengusung kader sendiri sebagai calon Wakil Bupati, yakni Ketua Tanfidziyah PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin. (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

NU Cabang Jember melalui MWC NU, memberikan petunjuk calon yang harus didukung kepada warga NU. Dari empat pasangan calon yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jember, tidak ada kader NU kecuali Abdullah Syamsul Arifin. Pemenangan pasangan Guntur Ariyadi-Abdullah Syamsul Arifin memasang, spanduk bertuliskan Posko Pemenangan H. Guntur-Gus Aab, dengan gambar lambang Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Meski penggunaan Kantor PCNU

sebagai posko pemenangan Pilkada dianggap tidak ada persosalan karena yang diusung merupakan Ketua terpilih PCNU Jember periode 2010-2015 yang pada periode sebelumnya, Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab sebagai Ketua tanfidziyah PCNU Jember. Sejumlah aktifis PMII STAIN Jember pada tanggal 3 Mei 2010 menurunkan spanduk pemenangan secara paksa (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2016).

Keputusan NU Cabang Jember untuk mendukung penuh pasangan Adullah Syamsul Arifin dipertegas dengan adanya hasil Musyawarah Kerja NU Jember 22 Mei 2010 menyatakan, secara kelembagaan NU harus memberikan petunjuk kepada kadernya tentang calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah. Munculnya Abdullah Syamsul Arifin, Ketua NU Cabang Jember, dalam Pilkada sebagai calon wakil bupati membuat NU secara kelembagaan harus mendukung dan menyukseskannya. Keputusan yang diambil adalah komitmen untuk berada dalam satu barisan. Sedangkan kriteria kandidat bupati dan wakilnya akan ditetapkan bersama. Sekilas perilaku PCNU secara kelembagaan dapat dikatakan kontra produktif dengan *khittah* 1926.

Meski secara kelembagaan NU Cabang Jember menyatakan mendukung pasangan Abdullah Syamsul Arifin, namun tokoh NU Cabang Jember lainnya masih menggunakan hak politiknya secara rasional. Bahkan tokoh NU Jember yang menilai keterlibatan NU Cabang Jember dalam mengurus Pilkada, justru memberikan dukungan terhadap pasangan calon lainnya. Akibatnya pasangan calon Abdullah Syamsul Arifin yang notabene ketua PCNU gagal dalam memenangkan Pilkada.

Tabel 5.5. Hasil pemilihan kepala daerah Jember tahun 2010

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Suara	Persentase
1	Moh. Sholeh dan Dedy Iskandar	49.912	4,21
2	Bagong Sutrisnadi dan Mohammad Mahmud	209.608	21,55
3	Guntur Ariadi dan Abdullah Syamsul Arifin	154.438	15,88
4	MZA Djalal dan Kusen Andalas	567.864	58,37
	Jumlah	981.822	100

Sumber: KPU Jember Tahun 2010.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemilihan kepada daerah Jember tahun 2010 MZA Djalal dan Kusen Andalas. ditetapkan sebagai pemenang Pilkada . Masing-masing pasangan calon nomor urut 1 | Moh. Sholeh dan Dedy Iskandar memperoleh; 49.912 suara (4,21%). Pasangan nomor urut 2. Bagong Sutrisnadi dan Mohammad Mahmud; 209.608 suara (21.55%), pasangan nomor urut 3. Guntur Ariadi dan Abdullah Syamsul Arifin memperoleh 154.438 suara (15,88%) dan nomor urut 4. MZA Djalal dan Kusen Andalas 567.864 suara (58,37%).

Meskipun MZA Djalal dan Kusen Andalas ditetapkan sebagai pasangan terpilih oleh KPU, namun keputusan tersebut masih digugat oleh pasangan calon lainnya. Keputusan KPU tentang penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal, 7 Mei 2010 dan ketetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah, 7 Juli 2010 lalu oleh ketiga calon, dianggap telah cacat hukum. Hal ini mengakibatkan rencana pelantikan sampai tertunda sebulan lebih, Hasil Pemilihan Kepala Daerah Jember di gugat ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan sempat dimunculkan isu bahwa pelantikan tidak akan dilaksanakan. Bahkan untuk mengisi kekosongan Bupati, Gubernur Jatim menggantikan posisinya sampai dua kali. Petama Sugiharto yang menjabat (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Setelah kehadiran Sukarwo ke Jember dengan pengawasan ketat dari aparat kepolisian, akhirnya MZA Djalal dan Kusen Andalas, secara resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati jember 2010-2015. Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.35-673 tahun 2010 yang ditandatangani Gamawan Fauzi tanggal 8 September 2010 dan Nomor. 132.35-674 tahun 2010 tentang pemberhentian Pejabat Bupati Jember Zarkasi, pengesahan pengangkatan Bupati Jember dan Pengesahan Wakil Bupati Jember. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor. 312/BA/B/2010 tanggal 7 Mei 2010 Jember bahwa Pilkada yang digelar 7 Juli 2010 (baca lampiran F).

5.5 NU Cabang Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2015

Pemilihan Kepala daerah Jember tahun 2015 diikuti dua pasangan calon. Pertama, pasangan Sugiarto-Moch Dwikoryanto yang diusung koalisi PKB, Partai Gerindra, PKS, PPP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Kedua, pasangan Faida-Abdul Muqit Arief diusung PDIP, Partai Nasdem, PAN, dan Partai Hanura. Sugiarto adalah Sekretaris Kabupaten Jember yang pensiun dini untuk mencalonkan diri. Dwikoryanto adalah dokter spesialis bedah saraf dan pernah menjabat pelaksana tugas Direktur Utama RS Daerah dr. Soebandi. Faida juga merupakan dokter pemilik Rumah Sakit Bina Sehat di Jember dan Al Huda di Banyuwangi. Sementara Abdul Muqit Arief adalah kyai di Kecamatan Silo, Jember. Sugiarto-Dwikoryanto adalah kandidat yang direstui Bupati Jember dua periode, MZA Djalal, sebagai pengganti. Djalal ikut turun tangan menggalang kemenangan. Sugiarto murni menggunakan orang-orang lokal yang dulu menjadi bagian dari tim sukses MZA Djalal (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Mayoritas PAC PDIP di Jember adalah pendukung Kusen Andalas, Wakil Bupati dan Ketua DPC PDIP Jember dua periode. Kusen dua kali diganjil saat Musyawarah Cabang dan Musyawarah Kerja Cabang Khusus yang memilih calon Bupati. Berdasarkan hasil Musyawarah Cabang PDIP, Kusen mendapat suara dukungan terbanyak untuk menjadi Ketua DPC kembali. Namun DPP PDIP malah menunjuk Tabroni sebagai Ketua DPC PDIP. Karena itu, pada Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun 2015, ada sejumlah pendukung Kusen di PDIP mendukung pasangan Sugiarto-Dwikoryanto, karena faktor kedekatan Kusen dengan MZA Djalal. DPC PDIP yang dipimpin Tabroni merekomendasikan pemecatan terhadap Kusen dan tiga legislator PDIP di DPRD Jember karena dinilai tidak menaati rekomendasi Pilkada DPP.

Partai Nasdem adalah partai pertama yang merekomendasikan Faida menjadi Bupati. Namun belakangan banyak kader dan pengurus partai Nasdem yang kecewa terhadap respon politik Faida. Puncaknya adalah saat panitia acara rapat kerja sekaligus konsolidasi dan sosialisasi DPD Nasdem Jember berani menolak dan

mengembalikan sumbangan uang dari Faida, karena dianggap nominalnya tidak pantas dan tidak layak.

Faida memobilisasi massa mengandalkan citra sukses operasi gratis Bina Sehat serta berusaha menggandeng kyai Muzaki pengasuh Pondok Pesantren Al Qodiri. Dua strategi tersebut membuat nama Faida-Muqiet melejit melebihi Sugiarto yang memang kurang dikenal publik. Meskipun situasi mulai berbalik, saat MZA Djalal pulang dari ibadah haji dan turun langsung memimpin kampanye pemenangan Sugiarto. Keterlibatan mantan Bupati periode 2000-2015 membuat komunitas Arab dan China di Jember lebih merapat ke Sugiarto. Bahkan Komunitas Arab sudah terang-terangan mendeklarasikan diri menjadi relawan pemenangan (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Kondisi sosial politik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 disikapi oleh NU Cabang Jember dengan memilih mengambil tindakan rasional. Sebagian kyai NU merapat ke Sugiarto, sebagian lainnya merapat ke Faida-Muqit. Meskipun demikian, yang terkesan terang-terangan mendekati NU secara struktural merupakan pasangan Sugiarto. Karena pertimbangan teologis, Sugiarto berani membuat kontrak jamiyah untuk membesarkan NU ke depan. Penandatanganan kontrak ini dilakukan di depan KH Kholil As'ad Syamsul Arifin, ulama asal Situbondo, yang memiliki pengaruh besar di kawasan Tapal Kuda. Sejumlah elemen di NU Cabang Jember yang mulanya berposisi dengan Djalal merapat mendukung Sugiarto, terutama setelah PKB menentukan pilihan (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Meskipun iklim kompetisi Pemilihan Kepala Daerah Jember cenderung bergerak menghangat, namun tak ada ketegangan berlebihan dalam pilkada di daerah ini. Satu-satunya ketegangan terjadi di Kecamatan Silo, sebab di Kecamatan Silo ada dua kyai besar yang sejak lama bersaing: KH Abdul Muqit Arief yang mencalonkan diri jadi wakil bupati dengan KH Imam Haramain, Ketua Dewan Syuro PKB Jember, yang mendukung Sugiarto–Dwikoryanto. Sikap dan pilihan yang diambil untuk ikut dalam ajang politik praktis Pemilihan Kepala Daerah Jember tidak melanggar

khittah NU 1926. NU dan warga *nahdliyin* memiliki hak dalam politik, bahkan keterlibatan NU Cabang Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah Jember juga tidak menyalahi keputusan *khittah* (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Eksplorasi NU Cabang Jember dalam mengurus politik praktis bisa dilihat dalam dua kasus yang saling bertentangan secara diametral namun sejalan dalam tujuan. *Pertama*, pernyataan Ayub Junaidi, Ketua GP Ansor Jember yang sekaligus legislator PKB, bahwa Paslon Bupati-Wakil Bupati dilarang menggunakan atribut NU untuk kepentingan Pilkada. *Kedua*, berkumpulnya sejumlah kiyai di Pondok Pesantren Nurul Islam Kelurahan Antirogo pada Selasa malam, 1 September 2015. Perkumpulan ini dihadiri oleh beberapa tokoh NU Jember antara lain: KH. Muhiyiddin Abdusshamad, Rais Syuriah PCNU Jember; KH. Imam HabibulHaramain Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangharjo Kecamatan Silo, Dewan Syuro PKB; KH. Kholil As'ad dari Situbondo, Lora Luthfi Najmuddin Rowotamtu, serta Bupati MZA Djalal dan Calon Bupati Sugiarto. Perkumpulan tersebut menghasilkan sebuah keputusan untuk memberikan dukungan terbuka kepada Paslon Nomor satu, Sugiharto-Dwi Koryanto. Keputusan tersebut dikenal dengan deklarasi Nuris (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2017).

Deklarasi Nuris dapat dikatakan kontradiktif dengan pernyataan Ayub Junaidi selaku ketua GP Anshor Jember. Deklarasi Nuris bisa saja menepis tidak hadirnya simbol-simbol NU. Namun, para pemberi dukungan tersebut merupakan tokoh-tokoh yang tidak terpisahkan dari NU. Pemisahan antara oknum dan pribadi dianggap sekedar teori, seperti memisahkan seseorang berperan sebagai Pengurus NU dan kapan dia menjadi pribadi ketika hadir dalam pertemuan, terlebih pertemuan yang mengklaim mewakili para kiyai seKabupaten Jember.

Setidaknya terdapat dua catatan penting dalam dua kasus tersebut, selain ada usaha kuat untuk menjadikan NU Cabang Jember sebagai komoditas, sebagai obyek untuk kemenangan Pemilihan Kepala Daerah, atau untuk tujuan yang bukan tujuan NU. Juga tokoh-tokoh yang menghadiri perkumpulan Nuris adalah para elit

kiyai baik secara struktur maupun kultur dan elit birokrasi Pemkab Jember. Usaha memainkan NU Cabang Jember sebagai alat legitimasi lawan atau legitimasi kawan merupakan akibat dari pandangan bahwa rakyat Jember seluruhnya adalah *nahdliyin*. Warga *nahdliyin* sebagai mayoritas akan selalu setia pada pengurus bahkan simbol NU. Pandangan ini melupakan kenyataan bahwa dalam beberapa kasus kader *nahdliyin*, atau calon yang didukung tokoh NU Cabang Jember mengklaim mewakili seluruh atau mayoritas *nahdliyin*, sering kali tidak berhasil. Mayoritas *nahdliyin* dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Jember 2015 telah menyadari perbedaan tegas antara tujuan dan alat. Partai hanyalah alat (*washilah*) untuk menyuarakan aspirasi jamaah, sedangkan tujuannya (*ghayah*) adalah untuk mewujudkan realitas dan kualitas hidup baru, untuk kemakmuran jamaah (Hasil wawancara dengan Nurhasan, 26 Agustus 2017).

Menurut Junaidi (Wawancara, 3 Januari 2017) larangan penggunaan atribut NU untuk kepentingan Pilkada sejalan dengan penolakan terhadap deklarasi Nuris. Mayoritas jamaah NU mengetahui Abdul Muqit Arief pernah menjabat sebagai Wakil Katib Syuriah dan saat ini sebagai A'wan PCNU Jember dan pernah menjadi Jurkam PKB. Dengan kata lain, Abdul Muqit Arief adalah kader NU, baik dengan atau pun tanpa atribut NU (baca lapiran F).

Larangan menggunakan atribut NU tidak akan menghapus jamaah. Sebab Rakyat sudah mengetahui tokoh yang setradisi dan mana yang tidak se tradisi. Kekuatan *nahdliyin* tidak terletak pada hadirnya simbol-simbol, bahkan tidak terletak pada keamanan struktur-organisasional. Kekuatan *nahdliyin* justru ada pada kesadaran sebagai *nahdliyin*. Atribut atau simbol bagi *nahdliyin* sekedar tanda, bukan tujuan. Pengurus hanyalah pengelola, bukan pemilik. Jamaah organik semacam inilah yang memiliki kekuatan real, menyatu dengan para kiyai organik karena kedekatan emosional yang terbangun secara alamiah.

Kehidupan alamiah jamaah NU membuat masyarakat dekat dengan siapa pun. Pola hidup alamiah ini yang mampu melahirkan para kiyai organik, kyai yang dekat dengan umat, jamaah, dan rakyat. Jamaah belajar hidup santun, empatik, dan

menjadi bagian utuh bangsa, karena persaudaraan sebagai sesama manusia sangat kuat diteladankan oleh kyai.

Munculnya kader NU Cabang Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun 2015, menyebabkan partisipasi politik warga *nahdliyyin* tidak fokus pada satu pilihan, namun tersebar ke sejumlah partai politik. Partisipasi politik yang tidak mono politik tidak terlepas karena adanya ormas-ormaslain di luar Ormas NU, bahkan realitas adanya penganut agama lain, yang juga merupakan rakyat Jember. Larangan Ayub Junaidi dan digelarnya Deklarasi Nuris telah membuat selain *nahdliyyin*serta non-Muslim yang ada di Kabupaten Jember merasa lebih nyaman bersama yang lain, karena dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Jember, masyarakat merasa sama-sama sebagai rakyat Jember. Nahdliyyin atau bukan, Muslim atau Non-Muslim, rakyat Jember yang akan menentukan hasil Pemilihan Kepala Daerah Jember 2015.

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam kampanyenya berusaha merebut simpati warga *nahdliyyin*. Pasangan calon nomor urut 2 Faida-Muqit menggandeng KH. Abdullah Syamsul Arifin saat kampanye ke Desa. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Sugiarto-Dwikoryanto menggandeng KH. As'ad Syamsul Arifin selaku tokoh NU kharismatik asal Situbondo (Irawan, 2016: tanpa halaman) (baca lampiran F). Kenyataan tersebut merupakan tindakan rasional yang dilakukan NU Cabang Jember dengan tidak menghimbau satu suara. Sebab, warga *nahdliyyin* sebagai basis NU Cabang Jember juga sudah menunjukkan pilihan rasional. Sehingga, dari sejumlah tokoh NU Cabang Jember, masyarakat sudah mulai memiliki indikator tersendiri dalam memberikan dukungan politiknya saat pemilu.

Pasangan Calon nomor urut 2 muncul sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih. Menyikapi hasil Pemilihan Kepala Daerah tersebut, sebanyak 500 Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jember melakukan kesepakatan bersama dengan menandatangani Petisi. Para Kyai menyikapi pelaksanaan Pilkada Jember. Para kyai sepakat agar seluruh pihak baik tim sukses paslon 1 Sugiarto-Dwikoryanto maupun Pasangan calon Faida-Muqit bersedia menerima hasil pilkada. Para Tim sukses pasangan calon nomor urut 1 diminta agar legowo atas kemenangan pasangan calon

nomor 2 dengan selisih 70 ribu suara. Sementara tim sukses paslon 2 juga diminta agar tidak bersikap berlebihan dengan hasil kemenangan pilkada. Penandatanganan Petisi itu secara simbolis dilakukan perwakilan para Kyai di Pondok Pesantren Al-Qodiri Kecamatan Patrang Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya bagian sarana dan alat, tidak merupakan tujuan akhir, sehingga momentum Pilkada harus tetap dijadikan sebagai upaya dalam mencapai manfaat dan maslahat bagi warga Jember maupun kepentingan seluruh umat (Hasil wawancara dengan Ayub Junaidi, 3 Januari 2017).

Penandatanganan petisi parakyai dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Kabupaten Jember mampu memberikan wawasan bagi seluruh pihak untuk menunjukkan kedewasaan berpolitik sehingga pelaksanaan pilkada jember dapat tetap berjalan damai dan aman. Petisi ini ditandatangani oleh seluruh Pengasuh Pondok Pesantren baik yang mendukung pasangan calon 1 maupun pasangan calon 2 pada pelaksanaan Pilkada 2015. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.6 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Jember Tahun 2015

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara	Persentase
1	Sugiarto-Dwikoryanto	451.530	46,21
2	dr. Faida-KyaiMuqit	525.540	53,79

Sumber: KPU Jember tahun 2015.

Tim Pasangan Calon nomor Urut 1 Faida-KyaiMuqit, sudah menuntaskan perhitungan seluruh TPS berbasis Formulir C1 di 4.347 TPS pada hari Kamis, 10 Desember pukul 15.30 WIB.. Perolehan suara pasangan nomor urut 1: 451.530 suara. Pasangan nomor urut 2: 525.540 suara. Selisih kedua pasangan calon: 7,58% atau sebesar 74.010 suara. Pasangan nomor 2 memenangkan 21 Kecamatan dari 31 kecamatan dan menang di 2557 TPS dari 4347 TPS. Pemilih yang berpartisipasi adaah 977.070 orang. Suara tidak sah adalah 19.905 suara atau dari total DPT yakni 1.892.453 pemilih.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab 4. NU Cabang Jember kembali terlibat dalam mengurus persoalan politik praktis di Kabupaten Jember tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya;

Sebagaimana yang dipaparkan pada bab 4. Hal-hal yang melatar belakangi NU Cabang Jember dalam berpartisipasi politik disebabkan oleh antara lain: Munculnya generasi ke tiga dari tokoh NU pada awal pendiriannya. Munculnya generasi ke tiga tersebut, yang kemudian terpengaruh dengan kondisi sosial politik, sehingga keinginan untuk mengurus politik praktis muncul dalam pemikiran tokoh NU. Ditambah, semasa Orde Baru NU kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga merasa perlu menunjukkan potensinya yang besar melalui jalur kepartaian. Momentum lain yang ikut mempengaruhi adalah, adanya kenyataan bahwa NU memiliki basis kultural yang besar, yang secara kultural mudah mengikuti petunjuk kyai.

Selanjutnya, sebagaimana yang dipaparkan pada bab 5 tentang bentuk partisipasi politik NU Cabang Jember. Dapat disimpulkan bahwa, kembalinya NU mengurus politik praktis setelah menyatakan kembali ke *khittah*, tidak terlepas dari tuntutan politik pada masa reformasi. Rasionalnya, jika NU tidak ikut mengambil bagian melalui jalur kepartaian, maka kekuatan NU hanya akan dimanfaatkan oleh kepentingan partai politik lain. Untuk itu NU secara organisatoris membentuk PKB. Melalui PKB, NU mulai menyebarkan kader-kadernya di sejumlah jabatan pemerintahan, baik Legislatif, maupun Eksekutif. Sebagai konsekuensi, NU Cabang Jember ikut berpartisipasi memenangkan kader NU yang maju ke Pileg maupun Pilkada, baik melalui kyai, maupun tokoh NU yang menjabat sebagai Pengurus PKB.

Sebagai dampak dari adanya partisipasi yang dilakukan oleh NU Cabang Jember sebagaimana dipaparkan pada bab 6. Partisipasi politik NU Cabang Jember berdampak terhadap terjadinya konflik kepentingan masing-masing kader NU,

bahkan hingga menuju proses jalur hukum. Selain itu, partisipasi politik yang ditunjukkan NU Cabang Jember menimbulkan adanya politik kyai, yang secara sengaja menggunakan kewibawaannya untuk memenangkan calon NU yang diusungnya, baik kader yang benar-benar NU maupun yang hanya sekedar mengaku NU menjelang Pileg maupun Pilkada. Daya tarik tersendiri yang dimiliki kyai NU, menyebabkan terjadinya perebutan pengarus dari masing-masing calon Pileg maupun Pilkada.

7.2 Saran

Berdasarkan beberapa persoalan yang berusaha diaungkap peneliti dalam penelitian ini. Ada beberapa persoalan yang belum bisa diungkap secara komprehensif dalam bentuk tulisan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan peneliti serta ketersediaan sumber yang minim. Terlepas dari hal tersebut peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa membangun relasi yang lebih kuat terhadap saksi sejarah yang masih hidup. Sebab, hasil penelitian ini masih kurang lengkap karena tidak semua saksi yang ada berhasil diwawancarai.
- 2) bagi NU Cabang Jember, peneliti menyarankan kegiatan sosial keagamaan NU Cabang Jember lebih diintensifkan dari pada kegiatan politik praktis. Sebab, terlalu masuknya NU dalam mengurus politik praktis hanya akan menggerus nilai-nilai kharismatik tokoh NU di mata masyarakat.
- 3) bagi masyarakat Jember, diharapkan lebih dewasa dalam menyikapi persoalan politik di Kabupaten Jember yang sering melibatkan kyai.
- 4) bagi partai politik, diharapkan untuk bisa mengedepankan politik yang bermoral, hindari adanya politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Alaena, B. 2000. *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Alfian, 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Anam.1999. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu.
- Anwar, A. 2004. *Avonturisme NU: Menjajaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin*. Bandung: Humaniora.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2000. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2010. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Basri, H. dkk. 1994. *Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Surabaya: Sahabat Ilmu.
- Bruinessen, M.V. 1994. *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chalik, A. 2008. "Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru; Studi Partisipasi Politik Elit Nahdlatul Ulama Jawa Timur." Tidak Diterbitkan. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Damsar. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Dewan Perwakilan Rakyat Jember. 2007. *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe Dan Sekarang 1931-2007*. Jember: Dewan Perwakilan Rakyat Jember
- Fadeli & Subhan. 2007. *Anotologi NU*. Surabaya: Khalista.

- Faisal, I. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Fathoni & Zen, M. 1992. *NU Pasca Khittah, Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Haidar, A. 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, S. 1990. *NU dan Politik: Perjalanan Mencari Identitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, A. dkk. 2002. "Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru." Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember: STAIN Jember.
- Huda, A.I. 1997. *Biografi Mbah Shiddiq*. Jember: Ponpes Al Fatah.
- Ismail, F. 1999. *NU, Gus Durisme dan Politik Kiai*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Karim, G. 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiS..
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1986. *Metode Wawancara dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. 2015. "Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Jember tahun 2005-2015". Tidak Diterbitkan. Jember. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Kuntowoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Marijan, K. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga.
- Mas' oed, M. dkk. 1991. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Moesa, H & Maschan, A. 1999. *Kyai & Politik dalam Wacana Civil Society*. Surabaya: LEPKISS.

- Musyaddad, A.A. 2001. "NU dan Politik ." Tidak Diterbitkan. Skripsi. Surabaya: Program studi Ilmu Politik UNAIR.
- Muzadi, H & Muzadi,A.M. 1999.*Jatidiri PKB*. Jember: Perc. Offsett Nuris.
- Muzadi, A.M. 2006. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista.
- Nahrawi, I. 2005. *Moralitas Politik PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern*. Malang: Averroes Press.
- Najmuddin, A.L. 2007. "NU Dalam Ruang Politik; Khittah dan Persaingan Elit di Jember Pasca Orde Baru." Tidak Diterbitkan. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana UGM.
- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember. 2004. *Laporan Pertanggungjawaban dan Hasil Musyawarah NU Cabang Jember*. Jember.: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember.
- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember. 2014. *Laporan Pertanggung Jawaban dan Hasil Musyawarah NU Cabang Jember*. Jember: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember.
- Peraturan Pemerintah Nomor 151. 2000. Tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6. 2005. Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Razak, A. 2012. *Jejak PKB Jember 1998-2012*. Jember: Media Centre DPC PKB Jember.
- Ritzer, G. 2014. *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Kencana.
- Romli, L. 2003. *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: LIPI.
- Saifuddin, M. 2014. "Dinamika politik Nu pada pilkada langsung di kabupaten jember tahun 2005" Tidak Diterbitkan..Skripsi. Jember: Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UNEJ
- Shihab, A. 2003. *Seribu Angin*. Yogyakarta: Qirtas.
- Sjamsuddin, H. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soon, K.Y. 2008. *Antara Tradisi dan Konflik Kepolitikan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: UI Press.

Suparyogo, I. 2009. *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*. Jakarta: Lintas Pustaka.

Undang-Undang Nomor 22. 1999. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32. 2004. Tentang Pemerintahan.

Wahyu, Y. "Pertarungan popularitas dan ujian politik PKB". *Kompas*. 8 Juli 2005.

Waris, A. 2007. "Peran politik kiai dalam pilkada di kabupaten jember 2005" Tidak Diterbitkan. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin . UIN Sunan Kalijaga

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana.

LAMPIRAN A. MATRIKS PENELITIAN

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Pendekatan Penelitian	Sumber Data
Sejarah Politik Lokal	Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada masa reformasi tahun 1998-2015	Penelitian Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1) bagaimana situasi dan kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi NU Cabang Jember berpartisipasi politik pada masa reformasi 1998-2015? 2) bagaimana bentuk partisipasi politik NU Cabang Jember pada masa reformasi 1998-2015? 3) bagaimana dampak berpartisipasi politik NU Cabang Jember terhadap NU Cabang Jember pada masa reformasi 1998-2015? 	<p>Metode Penelitian Sejarah dengan langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Topik 2. Heuristik 3. Kritik 4. Interpretasi 5. Historiografi 	Pendekatan Sosiologi Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen 2. Wawancara

LAMPIRAN B. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

NO	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	DATA DIKUMPULKAN
1	Penelusuran Dokumen	<ul style="list-style-type: none">a) data tertulis tentang jumlah penduduk Kabupaten Jember,b) data tertulis tentang partai politik berbasis NU dan non NU,c) data tertulis tentang hasil Pilkada Jember pada tahun 1998-2015,d) data tertulis tentang Organisasi Masyarakat berbasis NU,e) data tertulis tentang jumlah Pondok Pesantren,f) gambar terkait partisipasi politik NU Cabang Jember tahun 1998-2015.
2	Wawancara	<ul style="list-style-type: none">a) data-data lisan tentang keterlibatan tokoh atau kyai NU Cabang Jember terlibat langsung mengurus persoalan politik lokal Jember tahun 1998-2015,b) data-data lisan tentang pengaruh keputusan khittah NU terhadap dinamika NU,c) data-data lisan tentang bentuk partisipasi politik NU Cabang Jember dalam mengurus politik pemerintahan Jember tahun 1998-2015,d) data-data lisan tentang dampak partisipasi politik NU Jember terhadap dinamika NU Cabang Jember tahun 1998-2015,e) data-data lisan tentang proses rekonsiliasi NU Cabang Jember pasca terjadinya konflik internal.

LAMPIRAN C. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

NO	IDENTITAS INFORMAN	INFORMASI YANG DIKUMPULKAN
1	Nama : Nurahasan Jabatan : - Wakil Ketua PCNU Jember tahun 200-2014 - Ketua IKA PMII Jember tahun 2009-2014	a) substansi tujuan dasar NU, b) partisipasi politik NU Cabang Jember, c) relevansi partisipasi politik NU Cabang Jember dengan keputusan <i>khittah</i> NU, d) topoksi kyai atau tokoh NU Cabang Jember dalam polittik, e) sikap politik NU Cabang Jember secara kelembagaan, f) speran NU Cabang Jember dalam dinamika politik lokal Jember. g) pengaruh pasrtisipasi politik NU Cabang Jember terhadap konflik internal NU Cabang Jember. h) latar belakang NU Cabang Jember kembali mengurus politik, i) tafsir <i>khittah</i> NU seiring perkembangan jaman,

NO	IDENTITAS INFORMAN	INFORMASI YANG DIKUMPULKAN
2	<p>Nama : Ayyub Junaidi</p> <p>Jabatan: - Sekretaris DPC PKB Jember</p> <p>- Anggota Komisi D DPRD Jember tahun 2004-2009</p> <p>- Ketua Komisi D DPRD Jember tahun 2009-2014</p> <p>- Wakil Ketua DPRD Jember tahun 2015-2020</p> <p>Ketua GP Anshor Cabang Jember</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) kedudukan GP Anshor Jember dalam perjalanan politik NU Cabang Jember, b) sumbangsih GP Anshor Jember terhadap PCNU Jember, c) aturan rangkap jabatan GP Anshor Jember, d) dampak partisipasi politik NU Cabang Jember terhadap keberlangsungan PCNU Jember, e) simbolisasi NU Cabang Jember dalam percaturan politik lokal Jember. f) tokoh NU Cabang Jember yang terlibat dalam mengurus partai politik. g) keterlibatan PCNU Jember dalam bursa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember, h) sumbangsih tokoh atau kyai NU Cabang Jember terhadap calon Kepala Daerah dari kalangan NU Cabang Jember struktural maupun kultural, i) sikap politik NU Cabang Jember secara kelembagaan, j) manfaat partisipasi politik NU Jember terhadap PCNU Jember, k) solidaritas suara <i>nahdliyin</i> dalam proses pemilihan Kepala Daerah Jember

LAMPIRAN D. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**INFORMAN 1**

Nama : Nurhasan

Pertanyaan dan Jawaban

Apa yang melatarbelangi PCNU Jember untuk kembali mengurus persoalan politik setelah masa orde baru memilih kembali ke *khittah* 1926?

Terjun atau tidaknya NU ke dalam politik praktis, hanya persoalan momentum saja. Semasa orde baru memilih menjaga jarak ke politik, lebih dikarenakan rezim orde baru sengaja membonsai partai politik yang ada. Jika NU tetap bersikukuh tidak mengambil bagian dalam perjuangan melalui politik, maka potensi yang dimiliki NU hanya akan menjadi lahan subur oleh kalangan non NU.

Apa yang menjadi kekuatan NU Cabang Jember dalam transaksi politik dalam lingkup Kabupaten Jember?

Selain didukung dengan banyaknya Pondok Pesantren berkultur NU yang tersebar di seluruh Kecamatan di Jember. Faktor kharismatik tokoh NU juga menjadi nilai tawar tersendiri dalam politik. Terlebih sebagian tokoh NU sudah tidak bisa dibendung lagi syahwat politiknya.

Bagaimana dampak adanya keterlibatan tokoh NU Cabang Jember terhadap perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember?

Akibat NU Cabang Jember tidak terkonsentrasi pada satu calon saja, maka perolehan suara pada masing-masing Calon sering juga sama-sama warga NU Cabang Jember bergantung sebagaimana dekatnya Calon tersebut memiliki kedekatan dengan kyai NU.

Apa manfaat yang dapat diharapkan oleh PCNU Jember dari tokoh NU Cabang Jember yang terjun ke politik praktis?

Kembalinya NU Cabang Jember dalam mengurus politik, tujuannya selain belajar menyikapi perkembangan zaman secara rasional. Pengurus maupun kader NU Cabang Jember yang berhasil duduk dalam sebuah jabatan tertentu dalam pemerintahan sudah digaransi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap NU Cabang Jember.

Apakah perbedaan pilihan politik menjadi bagian hal yang disengaja dalam internal NU Cabang Jember?

Semua yang menjadi keputusan NU Cabang Jember dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat di dalamnya.

Bagaimana upaya NU Cabang Jember dalam menyikapi konflik yang terjadi setiap Pemilukada?

Konflik yang terjadi di internal NU Cabang Jember selalu disikapi dengan sikap ilmiah sesuai ajaran aswaja. Justru kemudian melalui peran tokoh NU Cabang Jember atau kyai, konflik yang ada tidak sampai menimbulkan desintegritas PCNU Jember.

Apa yang menjadi acuan NU Cabang Jember dalam menyikapi kondisi sosial politik Kabupaten Jember sejak masa reformasi tahun 1998-2015?

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang menjadi wadah para ulama dan pengikutnya, yang bertujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam berhaluan *ahlussunnah wal jamaah*. NU dalam menyikapi perkembangan jaman selalu mengedepankan aspek rasional dan profesional dalam menyikapi persoalan politik. Setiap warga NU berhak menentukan pilihan politiknya, bahkan jika harus bertentangan dengan mayoritas tokoh NU.

Bagaimana semestinya sikap NU Cabang Jember menyikapi persoalan yang menyangkut politik praktis?

NU pusat hingga Cabang tidak membatasi warga *nahdliyyin* untuk menentukan sikap dalam persoalan politik. Tetapi yang harus digarisbawahi, tokoh atau kyai yang masuk struktural NU Cabang Jember yang berkeinginan terjun mencalonkan sebagai kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus melepas jabatan terlebih dahulu dalam struktur PCNU Jember.

Bagaimana semestinya tokoh NU Cabang Jember memaknai keputusan *khittah* NU dikaitkan dengan politik?

Khittah NU tidak melarang untuk terjun ke politik. Justru dalam hal tertentu *khittah* NU menghendaki NU mengambil sikap politik, jika di dalamnya murni bertujuan mengembangkan NU. Meski demikian, *khittah* NU hingga saat ini masih multi tafsir.

Pada Pemilu pada Jember tahun 2010, anda pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, apakah hal tersebut juga merupakan bagian aplikasi *khittah*?

Khittah NU tidak dimaknai sebagai larangan bagi warga NU untuk terjun ke dalam politik praktis. Sah-sah saja jika salah satu pengurus NU yang memiliki komitmen untuk maju sebagai Calon Bupati maupun Wakil Bupati, asalkan tidak bertentangan dengan akidah *ahlussunnah wa jamaah* dalam praktiknya.

Saat anda mencalonkan sebagai Wakil Bupati, apakah hal tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat di internal PCNU?

Sudah pasti saat mencalonkan sebagai Calon Wakil Bupati Jember tahun 2010, tidak terlepas dari adanya dukungan dari kalangan tokoh NU di Jember. Meskipun kenyataannya masih saja ditolak oleh organisasi badan otonom NU itu sendiri.

Jika nanti kembali muncul calon Bupati dan Wakil Bupati dari kalangan tokoh struktural NU, apakah NU akan memback up calon tersebut?

Jika memiliki komitmen untuk mengembangkan NU, semestinya NU meskipun bukan secara struktural harus mendukung. Setiap Pemilukada di Kabupten Jember sejak tahun 2000, sudah bermunculan calon Bupati maupun Wakil Bupati, hanya saja dari beberapa calon yang ada notabne semua bersalal dari kalangan NU.

Seberapa jauh semestinya Tokoh NU Cabang Jember dalam menjaga jarak dengan partai politik, baik yang berbasis NU maupun tidak?

Secara tegas NU sudah membentuk garis pemisah antara NU secara kelembagaan dengan sejumlah partai politik, baik berhaluan NU maupun tidak. Meski pada kenyataannya pasca pembentukan PKB, sejumlah tokoh NU masih aktif di dalam struktur kepengurusan PKB. Bahkan juga terkadang, sejumlah pemenang calon koalisi PKB menggunakan sentimen NU untuk memobilisasi massa.

Sejauh ini adalah ketentuan baku yang dikeluarkan NU Cabang Jember secara organisatoris dalam menyikapi persolan politik di Kabupaten Jember?

Secara kelembagaan langkah-langkah NU sudah ditetapkan pada setiap keputusan muktamar NU. Meski ada pernyataan sikap, tetap berpedoman pada keputusan muktamar.

Sejauh mana peran NU Cabang Jember dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Jember sejak awal berdirinya hingga saat ini?

NU Cabang Jember secara kelembagaan lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Baik melalui Organisasi Badan Otonom yang ada, maupun melalui tokoh NU yang ada di dalam pemerintahan.

INFORMAN 2

Nama : Ayub Djunaidi

Pertanyaan dan Jawaban

Bagaimana Anshor Cabang Jember menyikapi segala kecenderungan pilihan politik PCNU Jember?

Anshor Cabang Jember sebagai badan otonom NU memilih netral dalam menyikapi segala bentuk politik praktis lokal Jember, meski pasangan calon di antaranya berasal dari kalangan NU struktural.

Sebagai badan otonom NU, apakah Anshor selalu searah dengan pilihan politik PCNU Jember?

Secara kelembagaan, GP Anshor Jember menolak adanya simbolisasi NU dalam urusan politik praktis. Dalam mengambil menyatakan pilihan politik, GP Anshor Jember tidak selalu sejalan dengan PCNU Jember.

Bagaimana sumbangsih PCNU Jember dalam membesarkan DPC PKB Jember?

Awal pendirian DPC PKB Jember mendapat perhatian khusus dari sejumlah tokoh PCNU Jember seperti KH. Khotib Umar, KH. Muhyiddin Abdusshomad, KH. Muhith Muzadi. Setelah dianggap mandiri, DPC PKB Jember mulai dilepas.

Sebagai sekretaris DPC PKB Jember, bagaimana anda melihat pola hubungan DPC PKB Jember dengan PCNU Jember?

Hubungan DPC PKB Jember dengan PCNU Jember hanya sebatas hubungan kultural, bukan struktural. Meski dalam percaturan politik, DPC PKB Jember memanfaatkan hubungan kultur untuk memobilisasi massa.

Menurut anda, mungkinkah suara NU Cabang Jember dapat dipersatukan dalam satu wadah partai politik?

Meski masyarakat NU 80 persen merupakan warga NU, tapi dalam hal politik sulit untuk menyatukan dalam satu pilihan politik. Selain karena terjadi perbedaan pilihan politik yang kyai NU Cabang Jember, warga NU Cabang Jember semakin rasional dan pragmatis.

Apakah ada tokoh politik dari kalangan NU Cabang Jember yang terlibat aktif mengurus partai politik?

Tokoh NU Cabang Jember baik dari kalangan praktisi maupun kyai, tersebar ke sejumlah partai politik yang ada di Kabupaten Jember. Hal tersebut kemudian menimbulkan beragamnya pilihan politik meski sesama NU.

Sejauh mana perbedaan pilihan politik kalangan NU Cabang Jember terhadap potensi terjadinya konflik?

Keterlibatan sejumlah tokoh NU Cabang Jember dalam mengurus politik praktis mengarah pada konflik internal yang kurang produktif. Tidak jarang PCNU Jember mendapat kritik dari sejumlah tokoh dari organisasi badan otonom itu sendiri.

Pernahkan anda dihadapkan pada kenyataan yang kontradiktif sebagai bentuk idealisme di dalam GP Anshor dan sebuah keharusan memperjuangkan DPC PKB Jember?

Anatara di dalam GP Anshor dan PKB tidak dapat digeneralisasi menjadi satu kesatuan. Sebab, sebagai GP Anshor wajib hukumnya memperjuangkan NU dan Kepentingan Bangsa. Sementara di dalam PKB, mau tidak mau harus mengambil langkah strategis, meski terkadang bertentangan dengan kehendak GP Anshor.

LAMPIRAN E. SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURATA KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayub Junaidi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Ketua GP Anshor Jember
Sekretaris DPC PKB Jember

Menyatakan bahwa:

Nama : Rusdi

NIM : 120210302019

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

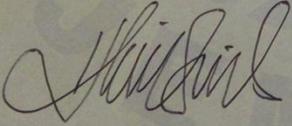
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Partisipasi Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada masa Reformasi tahun 1998-2015".

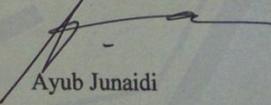
Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Januari 2017.....

Pewawancara, Informan,



Rusdi
NIM 120210302019


Ayub Junaidi

SURATA KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Hasan

Jabatan : Dosen FISIP Universitas Jember

Menyatakan bahwa:

Nama : Rusdi

NIM : 120210302019

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Program Studi : Pendidikan Sejarah

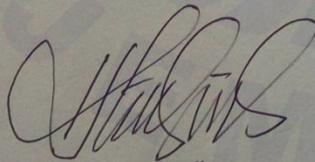
Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Partisipasi Nahdlatul Ulama Cabang Jember pada masa Reformasi tahun 1998-2015".

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

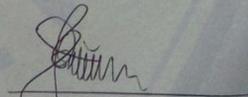
Jember, 26 Agustus 2016....

Pewawancara,

Informan,



Rusdi
NIM 120210302019



Nur Hasan

LAMPIRAN F. GAMBAR-GAMBAR



Gambar 01. Ketua Tim Lima KH. Abdul Halim Muhammad Berforo dengan KH. Ahmad Shiddiq

Sumber: Arsip DPC PKB Jember Tahun 1998.



Gambar 02. KH. Muhyiddin Abdusshomad Menjadi Juru Kampanye PKB di Puger

Sumber: Arsip DPC PKB Jember Tahun 1998.



Gambar 03. Prosesi pelantikan MZA Djalal-Kusen Andalas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2010

Sumber: Majalah Gempur



Gambar 04. Sugiarto dan Faida mengambil Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 05. KH As'ad Syamsul Arifin Tokoh NU Asal Situbondo mendampingi kampanye Pasangan Calon nomor urut 1 Sugiarto-Dwikoryanto.

Sumber: Arsip Tim Pemenangan Paslon no 1.



Gambar 06. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Faida-Muqit menggunakan simbol NU untuk menarik perhatian warga *nahdliyyin*.

Sumber: Arsip Ormas Pelopor Jember.